



# LAPORAN KINERJA 2024



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
DAFTAR GRAFIK .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
RINGKASAN.....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Struktur Organisasi.....	1
1.2. Isu Strategis.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KERJA .....</b>	<b>7</b>
2.1. Rencana Kerja Tahun 2023 .....	7
2.2. Perjanjian Kinerja.....	10
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>12</b>
3.1. Capaian Kinerja Sasaran / IKU Organisasi .....	14
3.2. Kinerja Anggaran .....	94
3.3 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya .....	106
3.5 Penghargaan .....	110
<b>BAB IV PENUTUP.....</b>	<b>112</b>
4.1. Kesimpulan Capaian Kinerja .....	112
4.2. Rekomendasi Tindak Lanjut.....	113
<b>LAMPIRAN.....</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Sebaran PNS Dinas Kelautan dan PerikananProv. Sulawesi Selatan Berdasarkan Golongan/Ruang Tahun 2024	3
Tabel 2.	Sebaran PNSD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024	4
Tabel 3.	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	5
Tabel 4.	Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2024	7
Tabel 5.	Hubungan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RENJA Dinas Tahun 2024	10
Tabel 6.	Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024	11
Tabel 7.	Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024	13
Tabel 8.	Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	15
Tabel 9.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I IKU I Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan	16
Tabel 10.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I IKU 2 Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Nilai Ekspor Sulawesi Selatan	19
Tabel 11.	Realisasi Ekspor dan Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2020 – 2024	19
Tabel 12.	Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis I IKU I Kontribusi PDRB Perikanan dan IKU 2 Kontribusi Nilai Ekspor perikanan	21
Tabel 13.	Capaian Kinerja Indikator Nilai produksi Budidaya	21
Tabel 14.	Capaian Kinerja indikator Nilai Produksi Perikanan Tangkap	22
Tabel 15.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran I IKU 3 Produksi Perikanan	23
Tabel 16.	Realisasi produksi perikanan tangkap , produksi budidaya dan produksi garam tahun 2020 – 2024	24
Tabel 17.	Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis I IKU 3 Produksi Perikanan	25
Tabel 18.	Perkembangan komoditi unggulan budidaya tahun 2020 -2024	27
Tabel 19.	Realisasi produksi perikanan budidaya per kabupaten/kota tahun 2021 – 2024	27
Tabel 20.	Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2020 -2024	29
Tabel 21.	Perkembangan produksi udang windu kab/kota tahun 2020 -2024	31

Tabel 22.	Ketersediaan Benur oleh UPT PBAPL tahun 2021 -2024	33
Tabel 23.	Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Tahun 2019-2024	37
Tabel 24.	Perkembangan produksi garam per kabupaten/kota tahun 2018 -2024	40
Tabel 25.	Sarana prasarana mendukung produksi perikanan 2020 -2024	44
Tabel 26.	Capaian Kinerja indikator sasaran I IKU 4 Konsumsi Ikan Tahun 2024	49
Tabel 27.	Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis I IKU 4 Angka Konsumsi Ikan	51
Tabel 28.	Realisasi Indikator kinerja Produksi olahan dan Nilai produksi Olahan produk perikanan	51
Tabel 29.	Jumlah UPI, UPI ber SKP dan SKP terbit tahun 2019-2024	53
Tabel 30.	Realisasi Indikator kinerja Persentase Pengujian Pembinaan Mutu Produk Perikanan	53
Tabel 31.	Capaian Indikator Sasaran Strategis II Meningkatnya kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan	58
Tabel 32.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 5 Nilai Tukar Usaha Perikanan	59
Tabel 33.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 6 Nilai Tukar Pembudidaya	61
Tabel 34.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 7 Nilai Tukar Nelayan	63
Tabel 35.	Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis II IKU 5, IKU 6 dan IKU 7	65
Tabel 36.	Capaian Indikator Cakupan Bina Kelompok Nelayan tahun 2017 – 2024	66
Tabel 37.	Capaian Indikator Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024	67
Tabel 38.	Capaian Indikator Sasaran Strategis III Meningkatnya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	68
Tabel 39.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran III IKU 8 Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola	69
Tabel 40.	Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola Tahun 2020 – 2024	69
Tabel 41.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran III IKU 9 Proporsi Tangkapan Ikan Berada dalam Batasan Biologis yang Aman	71
Tabel 42.	Realisasi Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	72
Tabel 43.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran III IKU 10 Kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan perikanan	74

Tabel 44.	Capaian Hasil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan & Perikanan Tahun 2020-2024	76
Tabel 45.	Jumlah Penanganan kasus di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan	77
Tabel 46.	Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis IV IKU 8, IKU 9 dan IKU 10	79
Tabel 47.	Perkembangan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola dan Daerah Perlindungan Laut	80
Tabel 48.	Perkembangan Cakupan Pengawasan SDKP Tahun 2020 -2024	82
Tabel 49.	Jumlah Sarana Prasarana Pengawasan di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan	83
Tabel 50.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	85
Tabel 51.	Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV IKU 11 Nilai SAKIP OPD	86
Tabel 52.	Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024	87
Tabel 53.	Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis IV IKU 11 Nilai SAKIP OPD	89
Tabel 54.	Capaian Indikator Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah	89
Tabel 55.	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program tahun 2024	90
Tabel 56.	Capaian Indikator Kinerja rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	91
Tabel 57.	Capaian Indikator Kinerja Persentase Temuan Material LHP yang Selesai ditindaklanjuti	92
Tabel 58.	Jumlah Temuan material LHP tahun 2019 – 2024	92
Tabel 59.	Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2024	94
Tabel 60.	Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2024	97
Tabel 61.	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Berdasarkan Aspek Ketercapaian Kinerja dengan Realisasi Anggaran Tahun 2024	108

## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.	Rekapitulasi Jumlah ASN berdasarkan Golongan	3
Grafik 2.	Nilai PDRB sektor Perikanan dan PDRB Povinsi Sulawesi Selatan	17
Grafik 3.	Produksi dan nilai produksi perikanan	18
Grafik 4.	Nilai Produksi dan Nilai Ekspor Rumput Laut	20
Grafik 5.	Produksi dan Nilai Produksi Rumput Laut	29
Grafik 6.	Produksi Garam tahun 2017 – 2024	40
Grafik 7.	Produksi garam bulan Maret - Desember Tahun 2023 – 2024	41
Grafik 8.	Angka Konsumsi Ikan Tahun 2017 – 2024	50
Grafik 9.	Perkembangan Produksi dan Nilai produksi Produk Olahan Perikanan	52
Grafik 10.	Perbandingan Indeks yang diterima Indeks yang dibayar pelaku Usaha Perikanan Tiap bulan tahun 2023 – 2024	59
Grafik 11.	Nilai Tukar Pembudidaya tahun 2017-2024	61
Grafik 12.	Perbandingan Indeks yang diterima dan Indeks yang dibayar pembudidaya Tiap bulan tahun 2024	62
Grafik 13.	Nilai tukar nelayan tahun 2017- 2024	64
Grafik 14.	Perbandingan Indeks yang diterima nelayan dan Indeks yang dibayar nelayan bulan Januari – Desember tahun 2024	64
Grafik 15.	Perbandingan Nilai Tukar Nelayan Bulan Januari - Desember Tahun 2020-2024	65
Grafik 16.	Perbandingan produksi tangkapan ikan di laut terhadap jumlah tangkapan lestari	73
Grafik 17.	Persentase ketidakpatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	75
Grafik 18.	Persentase jenis kasus yang ditangani	78
Grafik 19.	Jumlah Pokmaswas yang terbentuk tahun 2023-2024	78
Grafik 20.	Alokasi anggaran tahun 2024	96

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.	Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan	2
Gambar 2.	Daftar Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Standar Operasional tahun 2024	36


## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan berkat izin dan ridhanya sehingga Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2024 dapat diselesaikan sebagai wujud implementasi SAKIP yang merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan dan sebagai alat ukur terhadap capaian keberhasilan yang telah dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2024. Walaupun data yang ditampilkan pada Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan ini masih merupakan data sementara karena masih menunggu jadwal Validasi Nasional oleh KKP, diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan Kelautan dan Perikanan yang akan datang dan tidak menutup kemungkinan adanya kekurangan atau ketidaksempurnaan baik dalam penyajian formulasinya maupun dalam penyajian isinya. Untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun senantiasa diperlukan bagi kesempurnaan laporan ini.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja ini diucapkan terima kasih.

Makassar, Februari 2024  
KEPALA DINAS



**Dr. M. Ilyas, ST, M.Sc**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP : 197006061996031006



## RINGKASAN

Berdasarkan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan yaitu terdiri dari 4 Sasaran Strategis dengan 11 indikator kinerja. Sebanyak tujuh indikator dengan kriteria realisasi kinerja Sangat Tinggi yaitu : Produksi Perikanan (101,89 %), Konsumsi Ikan (101,17 %), NTUP (100,06 %), NTN (101,17 %), NTPi (99,21 %), Proporsi Tangkapan Ikan yang Berada Dalam Batasan Biologis yang Aman (131,45 %) dan nilai SAKIP perangkat Daerah (98,01 %). Satu Indikator kriteria realisasi kinerja Tinggi yaitu Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Ekspor Sulawesi Selatan (80,84 %). Dua indikator kriteria realisasi kinerja Sedang yaitu Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan (74,29 %) dan Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola Secara Berkelanjutan (70,84%) sedangkan satu indikator kriteria realisasi kinerja Rendah yaitu Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (51,07 %). Realisasi anggaran tahun 2024 sebesar 94,02 % dari pagu Rp 91.464.384.438 dan dan realisasi fisik sebesar 96,25 %.

Untuk percepatan pencapaian target pembangunan diperlukan upaya perbaikan diantaranya (1) Peningkatan nilai produksi perikanan (*value added*) melalui peningkatan daya saing, standarisasi kualitas, mutu dan harga untuk meningkatkan nilai jual/nilai produk perikanan, (2) Mengoptimalkan produktivitas melalui penerapan teknologi yang aplikatif, efektif, efisien dan ramah lingkungan serta pengembangan percontohan usaha perikanan sebagai upaya mensosialisasikan model pengelolaan berkelanjutan, (3) Manajemen tata kelola perbenihan yang didukung peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kualitas induk (broodstock), penyediaan pakan berkualitas, pengendalian penyakit sebagai upaya optimalisasi produksi benih berkualitas, (4) Strategi dan inovasi pengawasan, peningkatan kapasitas pengawas dan pokmaswas serta penguatan kolaborasi antar lembaga dan pemerintah daerah (5) Komitmen dan kolaborasi bersama Pemerinatah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perluasan dan pengelolaan kawasan konservasi secara efektif.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 86 Tahun 2016 telah disusun Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang kelautan dan perikanan dan tugas pembantuan.

Adapun uraian Adapun struktur organisasi lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sesuai Pergub 86 tahun 2016 adalah sebagai berikut :

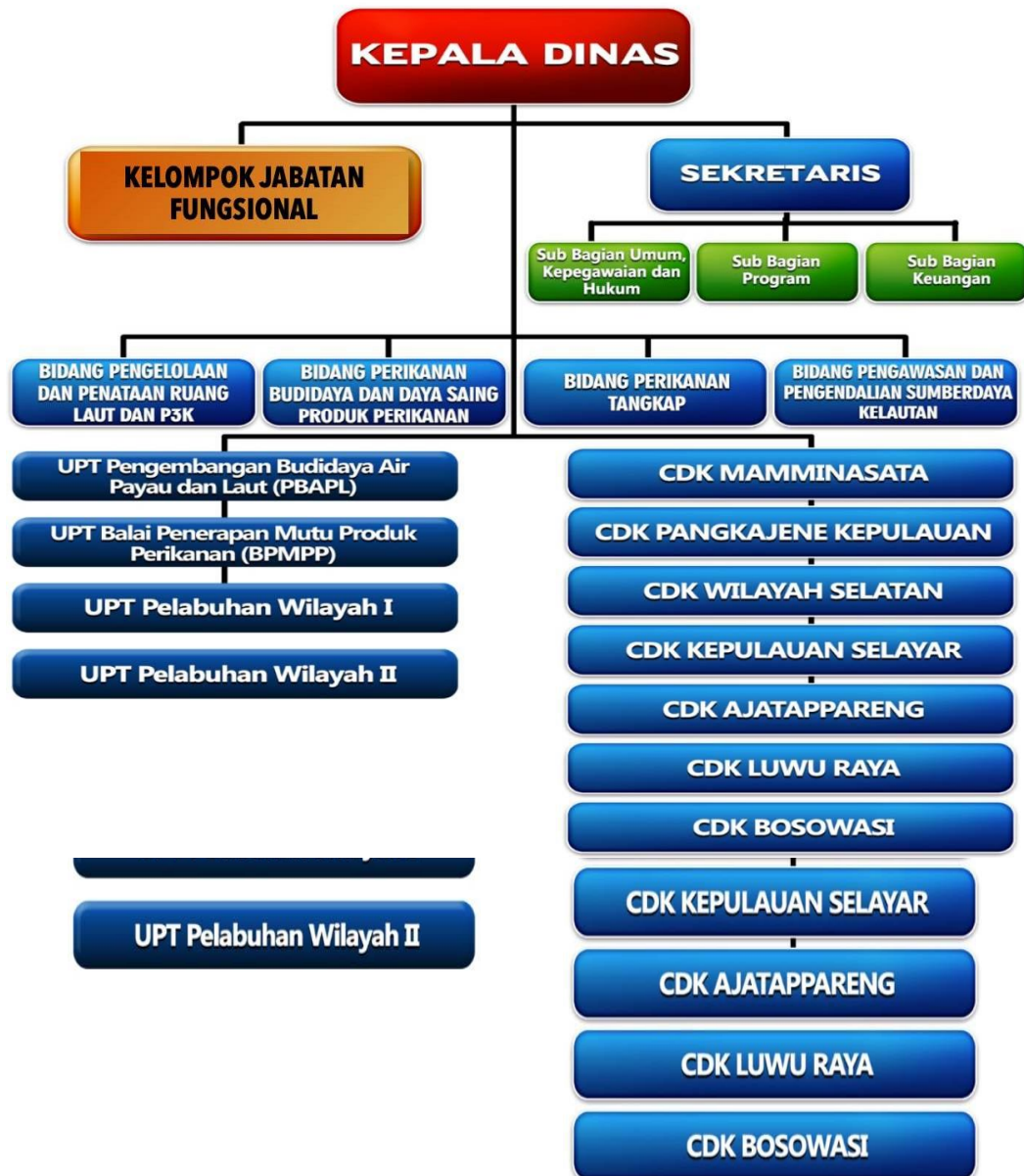
#### **1.1. STRUKTUR ORGANISASI**

Organisasi perangkat Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris
3. Kepala Bidang (4 Bidang)
4. Kepala UPTD (4 UPTD)
5. Kepala Cabang Dinas Kelautan (7 CDK)

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebagai berikut :

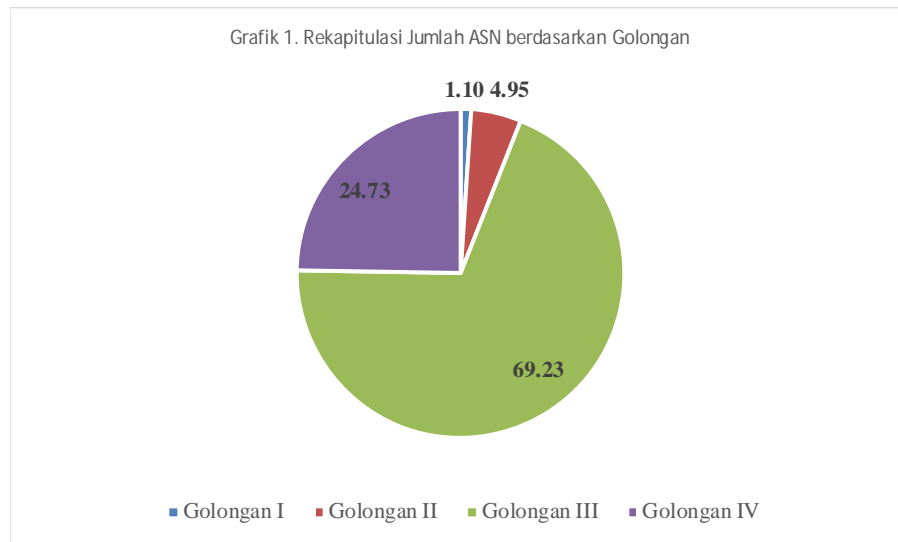
Gambar 1  
Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan



Dalam menunjang tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan salah satu faktor yang penting adalah faktor Sumberdaya Manusia Aparatur. Adapun jumlah PNS yang pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sampai dengan akhir bulan Desember 2024 sebagai berikut:

Tabel 1.  
Sebaran PNS Dinas Kelautan dan PerikananProv. Sul-Sel TA. 2024 Berdasarkan Golongan/Ruang

No.	Gol. Ruang	A		B		C		D		Jumlah		Total
		L	W	L	W	L	W	L	W	L	W	
1	I	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	2
2	II	0	0	1	0	4	0	4	0	9	0	9
3	III	8	8	7	3	11	8	32	49	58	68	126
4	IV	20	14	5	5	1	0	0	0	26	19	45
<b>Jumlah</b>		28	22	13	8	17	8	36	50	94	88	182



Sebaran PNSD lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan menurut pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 2.  
Sebaran PNSD Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sul-Sel Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2024

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Total
		Pria	Wanita	
1	S3	4	2	6
2	S2	25	32	57
3	S1	47	51	98
4	DIII	3	0	3
5	SMA	13	3	16
6	SMP	0	0	0
7	SD	1	0	1
<b>Jumlah</b>		<b>94</b>	<b>88</b>	<b>182</b>

## 1.2. ISU STRATEGIS

Isu strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan di masa lima tahun mendatang. Informasi berdasarkan perumusan isu-isu strategis sesuai dengan tugas dan fungsi melalui identifikasi masalah pokok, masalah hingga akar masalah sebagai berikut :

Tabel.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Selatan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Menurunnya ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil akibat dampak pandemic Covid 19	Adanya pembatasan sosial dalam melakukan aktivitas usaha perikanan	Pertumbuhan produksi perikanan terjadi perlambatan
2	Produktivitas dan daya saing produksi kelautan dan perikanan masih rendah	Sarana dan prasarana pendukung masih terbatas	Pengelolaan sumberdaya dan kebutuhan sarana dan prasarana tidak terstruktur
3	Nilai tambah produk olahan dan pemasaran belum optimal dan berdaya saing	Penerapan inovasi dan teknologi pada produk olahan masih terbatas	Masih rendahnya SDM yang terampil berinovasi dan pembinaan daya saing produk perikanan yang masih rendah
4	Masih lemahnya manajemen pelabuhan perikanan dan TPI sehingga kualitas produksi kurang	Pelayanan pelabuhan perikanan, PPI dan TPI tidak optimal	Sarana dan prasarana pelabuhan belum Optimal Belum Optimalnya Pembinaan terhadap nelayan dan petugas pelabuhan
6	Kualitas Kelembagaan Nelayan, Pembudidaya & Pengolah serta Kesenjangan Gender dalam kelembagaan kelompok	Kelompok nelayan masih menggunakan sarana prasarana alat tangkap tradisional dan Masih kurangnya Kelompok nelayan dalam bentuk korporasi	Kualitas SDM nelayan sebagian besar masih relatif rendah
7	Masih maraknya Kegiatan Illegal, Unregulated and Unreported (IUU) Fishing	Kegiatan pengawasan belum optimal	Kurangnya sarana prasarana dan SDM dalam penegak hukum di laut Kurangnya regulasi terkait penataan dan pembinaan terhadap pelaku usaha perikanan terhadap kepatuhan kelengkapan dokumen perizinan
8	Marak terjadi pelanggaran dan kerusakan lingkungan pesisir dan laut	Pemanfaatan pesisir dan ruang laut belum mengacu pada Dokumen RZWP3K dan rencana alokasi ruang	Terjadinya konflik kepentingan antar sektor kelautan dan perikanan dengan sektor pertambangan dan pariwisata

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
	serta Padat tangkap (Overfishing) di perairan pantai		khususnya di wilayah laut dan pesisir Kurangnya pemahaman masyarakat terkait dasar hukum pemanfaatan ruang laut
9	Kebijakan "limited access" belum diterapkan secara menyeluruh.	Degradasi habitat dan ekosistem pesisir dan laut	Kondisi terumbu karang yang persentasinya lebih besar sudah dalam keadaan rusak dan Penurunan kuantitas mangrove akibat adanya eksploitasi besar-besaran
10	Mekanisme pengumpulan data perikanan bersifat masif dan belum adanya sistem pengelolaan data yang terintegrasi	Sistem data belum terkoordinasi dengan baik	Sistem pendataan dan informasi perikanan yang belum andal dan masih parsial
11	Data yang terintegrasi Penerapan Teknologi untuk budidaya, penangkapan serta pengolahan hasil kelautann dan perikanan yang belum merata	SDM yang masih menerapkan teknologi Konvensional	Pendampingan dalam penerapan teknologi belum terlaksana dengan baik dan holistik.

Sumber : Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2024-2026

Dari hasil identifikasi permasalahan tersebut maka isu strategis Renstra Perubahan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan pada periode 2024 - 2026 adalah:

1. Belum optimalnya pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berdaya saing berbasis pengembangan Kawasan dan komoditas unggulan akibat masih rendahnya SDM yang terampil pada aparaturnya dan pelaku usaha perikanan serta dukungan infrastruktur dan sarana prasarana usaha perikanan.
2. Kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil masih dibawah serta kurangnya akses permodalan untuk mendukung usaha
3. Degradasi daya dukung Lingkungan Pesisir dan Laut serta masih rendahnya ketaatan pelaku usaha perikanan terhadap peraturan.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1. PERENCANAAN

Rencana Kinerja pada Renstra dan Renja Dinas Kelautan dan Perikanan  
Provinsi Sulawesi Selatan yang hendak dicapai untuk tahun 2024 yaitu :

Tabel 4  
Rencana Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulawesi Selatan tahun 2024

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
1.	<b>Sasaran : Terlaksananya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Akuntabel</b>	<b>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</b>	<b>86 – 88 (A)</b>	<b>Kepala Dinas</b>
a.	Program Penunjang urusan pemerintah daerah	Nilai rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah (%)	82,96	Sekretaris, Eselom III UPT dan CDK
		Rata-rata nilai SKP ASN Perangkat Daerah (%)	100,42	
		Persentase temuan LHP Selesai Ditindaklanjuti (%)	79,32	
2.	<b>Sasaran : Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan</b>	<b>Kontribusi Sub Sektor Perikanan terhadap PDRB (%)</b>	<b>10,5</b>	Kepala Dinas
	<b>Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Ekspor Sulawesi Selatan (%)</b>	<b>22,55</b>		
	<b>Produksi Perikanan (ton)</b>	<b>4.759.871,9</b>		
	<b>Konsumsi Ikan (kg/kap/thn)</b>	<b>72,48</b>		
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp.M)	11.933,56	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
		Produksi perikanan tangkap (ton)	442.959,6	Kepala Bidang Perikanan Tangkap, Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)



No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
		Persentase Pelabuhan Perikanan yg memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	84,21	Kepala Bidang Perikanan Tangkap , Kepala UPT Pelabuhan Wilayah I dan II (Eselon III)
b.	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Nilai produksi perikanan budidaya (Rp.M)	21.850,16	Kepala Bidang Perikanan Budidaya (Eselon III)
		Produksi perikanan budidaya (ton)	4.331.299,7	Kepala Bidang Perikanan Budidaya , Kepala UPT PBAPL (Eselon III)
		Persentase ketersediaan benur berkualitas (%)	85	Kepala UPT BPAPL (Eselon III)
c.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau Pulau Keci	Produksi garam rakyat (ton)	5.000	Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (eselon III)
		Cakupan Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Produksi Perikanan (%)	100	Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil , Kepala CDK (eselon III)
d.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp. M)	391,94	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing, Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Produksi olahan ikan konsumsi (ton)	6.150,43	Kepala Bidang Perikanan Budidaya dan Daya Saing, Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
		Persentase pengujian mutu produk perikanan (%)	100	Kepala UPT BPMPP (Eselon III)
3.	Sasaran : Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	110,84	Kepala Dinas
		Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	111,07	
		Nilai Tukar Nelayan (NTN)	110,46	

No	Sasaran Strategis/ Program	Indikator Kinerja	Target	Pelaksana Kinerja
a.	Program Pengelolaan Perikanan tangkap	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	29	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
		Persentase Produksi perikanan kelompok nelayan (%)	30,62	Kepala Bidang Perikanan Tangkap (Eselon III)
4.	<b>Sasaran: Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan</b>	<b>Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)</b>	<b>97,8</b>	<b>Kepala Dinas</b>
		<b>Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman</b>	<b>59,56</b>	
		<b>Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola (%)</b>	<b>96,08</b>	
a.	Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan PPK	Perluasan kawasan konservasi perairan dikelola secara berkelanjutan (Ha)	816.593,22	Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kepala CDK (Eselon III)
b.	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	100	Kepala Bidang Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Kepala CDK (Eselon III)

Agar arah pembangunan terintegrasi dengan **Pembangunan Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan** maka sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2024 hubungan tujuan dan sasaran saling mendukung dan terkait satu sama lain yang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 5.**  
Hubungan Tujuan dan Sasaran RKPD dengan RENJA Dinas Tahun 2024

No	RKPD		Renja	
	Tujuan	Sasaran	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan	1.Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	1.1.Meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah
2	Mengoptimalkan pengelolaan Sumberdaya alam secara berdaya saing tanpa mengabaikan kelestarian dan daya dukung lingkungan hidup	2.1.Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk sektor perekonomian berbasis sumberdaya alam	2.Meningkatkan produksi dan nilai tambah produk perikanan yang berdaya saing	2.1.Meningkatnya produksi perikanan dengan menambah jumlah faktor produksi dan produktivitas produksi 2.3.Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan
3	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berketahanan bencana	3.1.Terpeliharanya kualitas lingkungan hidup serta kemampuan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim	2.Meningkatkan kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	2.1.Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan

## 2.2. PERJANJIAN KINERJA

Penetapan Kinerja merupakan pelaksanaan Permenpan RB nomor 53 Tahun 2014 yang merupakan komitmen pimpinan, merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja

aparatur sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah.

Tabel 6.  
Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1.	Nilai sakiip perangkat daerah (%)	86,88 (A)
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	2.	Kontribusi subsektor perikanan terhadap PDRB (%)	10,5
	3.	Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sul Sel (%)	22,55
	4.	Produksi perikanan (ton)	4.779.259,3
	5.	Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	72,48
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	6.	Nilai tukar usaha perikanan (NTUP)	110,84
	7.	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	111,07
	8.	Nilai tukar nelayan (NTN)	110,46
Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	9.	Kepatuhan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan (%)	97,8
	10.	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	59,56
	11.	Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)	96,08

Program	Anggaran (Rp)
1. Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	40.260.991.191
2. Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	7.495.819.323
3. Penegloalaan perikanan tangkap	29.837.392.450
4. Pmgelolaan perikanan budidaya	9.510.481.140
5. Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan perikanan	2.454.035.990
6. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	1.905.664.344

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mempermudah interpretasi atas pencapaian sasaran dari program dan kegiatan serta indikator makro yang diberlakukan skala nilai peringkat kinerja yang mengacu pada formulir tabel VII-C dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017 sebagai berikut :

Interval Nilai Realisasi Kinerja (Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja)
$\leq 50$ (Sangat Rendah / SR)
$50.1 \leq 65$ (Rendah / R)
$65.1 \leq 75$ (Sedang / S)
$75.1 \leq 90$ (Tinggi / T)
$90.1 \geq$ (Sangat tinggi / ST)

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisa pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan. Perhitungan pencapaian indikator sasaran menggunakan asumsi I : jika **semakin tinggi realisasi**, menunjukkan

pencapaian kinerja yang **semakin baik** atau sebaliknya **realisasi makin rendah** pencapai kinerja **semakin rendah/jelek** adalah :

$$\% \text{ capaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan apabila **semakin tinggi realisasi** menunjukkan pencapaian sasaran kinerja **semakin rendah/jelek**, atau sebaliknya **realisasi semakin rendah** pencapaian kinerja **semakin baik** menggunakan rumus :

$$\% \text{ pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(2 \times \text{rencana}) - \text{realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Capaian untuk setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.  
Capaian Perjanjian Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
I. Terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel	1. Nilai sakiip perangkat daerah (%)	86 -88 (A)	86,25	98,01
II. Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	2. Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB (%)	10,5	7,8	74,29
	3. Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel (%)	22,55	18,27	80,84
	4. Produksi perikanan (ton)	4.779.259,3	4.869.707,84	101,89
	5. Konsumsi Ikan (kg/kap/tahun)	72,48	72,6	101,17

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
III. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	6. Nilai tukar usaha perikanan (NTUP)	110,84	111,20	100,06
	7. Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	111,07	106,84	96,19
	8. Nilai tukar nelayan (NTN)	110,46	111,92	101,32
IV. Meningkatnya kelestarian sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	9. Kepatuhan Pelaku Usaha kelautan dan perikanan (%)	97,8	48,97	50,07
	10. Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	59,56	62,52	104,96
	11. Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)	96,08	68,05	70,84

### 3.1. CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS/ IKU

Untuk memberikan informasi yang lebih transparan maka hasil pengukuran capaian kinerja selanjutnya dievaluasi dan dianalisis untuk mengetahui faktor-faktor penyebab target yang ditetapkan dapat tercapai atau tidak tercapai. Pelaksanaan program/kegiatan Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Penjelasan prestasi kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sepanjang tahun 2024 sebagaimana berikut.

## SASARAN I : Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi Sektor Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan

Terdapat 4 (empat) indikator keberhasilan capaian sasaran strategis Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan Perikanan yang Berkelanjutan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 8.  
Capaian Sasaran Strategis Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	Kontribusi sub sektor perikanan terhadap PDRB Sulsel (%)	10,5	7,8	74,29
	Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel (%)	22,55	18,27	80,84
	Produksi perikanan (ton)	4.779.259,3	4.869.707,84	101,89
	Konsumsi Ikan	72,48	72,60	101,17
<b>Rata-rata capaian sasaran</b>				<b>89,30</b>

### IKU1

### KONTRIBUSI PDRB PERIKANAN

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perikanan adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor perikanan di suatu daerah/wilayah. PDRB atau pendapatan regional dibedakan atas dua bentuk yaitu harga berlaku dan harga konstan yaitu 1) Pendapatan regional yang didalamnya masih ada unsur inflansi dinamakan pendapatan regional atas dasar harga berlaku, 2) Pendapatan regional dengan faktor inflasi yang sudah ditiadakan merupakan pendapatan regional atas harga konstan, artinya harga



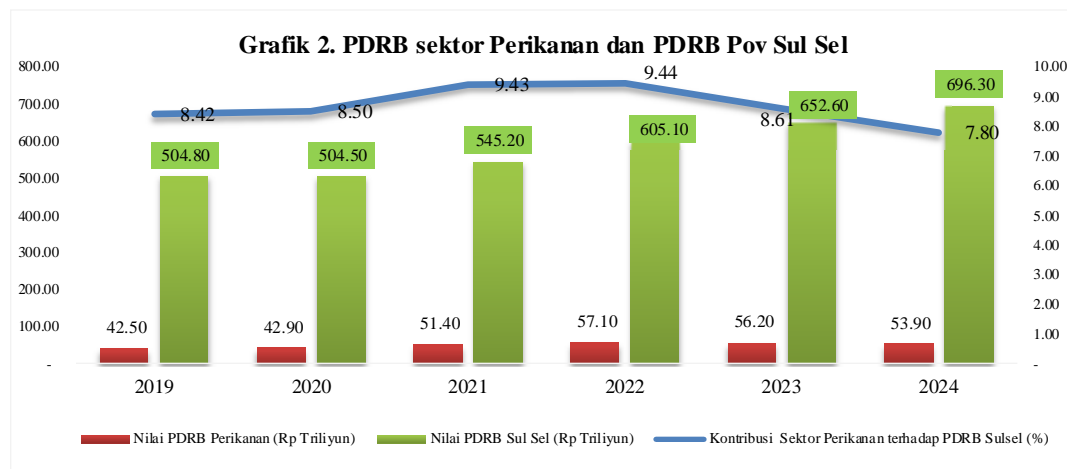
produk didasarkan atas harga pada tahun tertentu yang disebut tahun dasar. Data kontribusi PDRB perikanan menggunakan harga belaku dengan tahun dasar tahun 2010 yang diperoleh dari Data Badan Pusat Statistik. Rumus penghitungan kontribusi PDRB Perikanan adalah :

$$\text{kontribusi PDRB perikanan} = \frac{\text{Nilai PDRB sektor perikanan}}{\text{Nilai PDRB Sulawesi Selatan}} \times 100\%$$

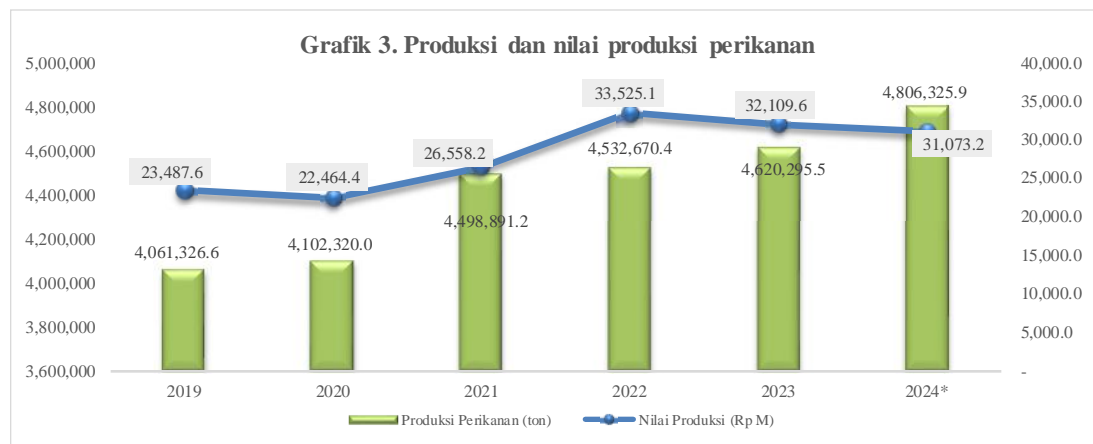
Tabel 9  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Kontribusi PDRB Perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024-2026)	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Kontribusi PDRB Perikanan (%)	8.50	9.43	9.44	8,61	7,80	10,5	74,29	11,14	70,02

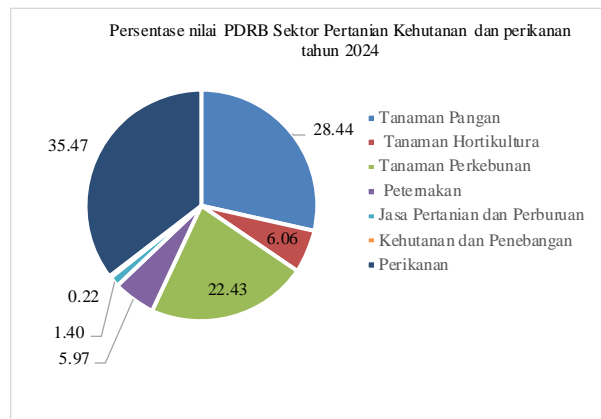
Realisasi kontribusi PDRB sub sektor perikanan pada tahun 2024 mencapai target sebesar 74,29 % namun mengalami penurunan sebesar 9,43% dibandingkan tahun 2023 sebesar 8,61 % . Kurun waktu 2020-2024 kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan menunjukkan angka yang fluktuatif dan mengalami trend kenaikan 2020-2023 namun mengalami perlambatan di tahun 2023 dan 2024.



Kontribusi PDRB perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan tahun 2024 sebesar 7.80 % dengan nilai PDRB perikanan sebesar Rp 53.9 triliun lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 8,61 % dengan nilai PDRB Perikanan Rp 56.2 Triliun. Sebagaimana ditunjukkan grafik 2, Nilai PDRB Provinsi Sulawesi Selatan meningkat sebesar 6,70 % tidak seiring dengan nilai PDRB perikanan yang turun sebesar 4,09 % dibandingkan tahun 2023. Sektor yang mempengaruhi penurunan nilai produksi perikanan sebesar 3,23 % yaitu nilai produksi budidaya sebesar 8,24 %. Penurunan pada nilai produksi budidaya disebabkan karena penurunan nilai rumput laut sebesar 25,01 % atau sebesar Rp 6,9 triliun tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 sebesar Rp. 9,2 Triliun.



Jika dilihat dari Nilai PDRB pertanian, kehutanan dan perikanan tahun 2024, Nilai PDRB perikanan berkisar 35,47 % (Rp 53.94 triliun) atau merupakan kontributor terbesar dari total nilai PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (152,05 triliun). Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan berperan penting terhadap PDRB Provinsi Sulawesi Selatan.



Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan nilai PDRB perikanan adalah meningkatkan produktivitas (volume dan nilai) dan daya saing melalui inovasi pengembangan teknologi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan produk perikanan kelautan lainnya.

**IKU 2**

**KONTRIBUSI NILAI EKSPOR PERIKANAN TERHADAP EKSPOR SULAWESI SELATAN**

Indikator kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulawesi Selatan untuk melihat peran sektor perikanan terhadap pemasukan atau nilai uang yang didapat dari penjualan produk kelautan dan perikanan ke luar negeri. Nilai ekspor berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di dalam negeri.

Rumus penghitungan kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulawesi Selatan adalah :

$$\text{kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulsel} = \frac{\text{Nilai Ekspor perikanan}}{\text{Nilai Ekspor Sulawesi Selatan}} \times 100\%$$

Tabel 10.  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Nilai Ekspor Sulawesi Selatan

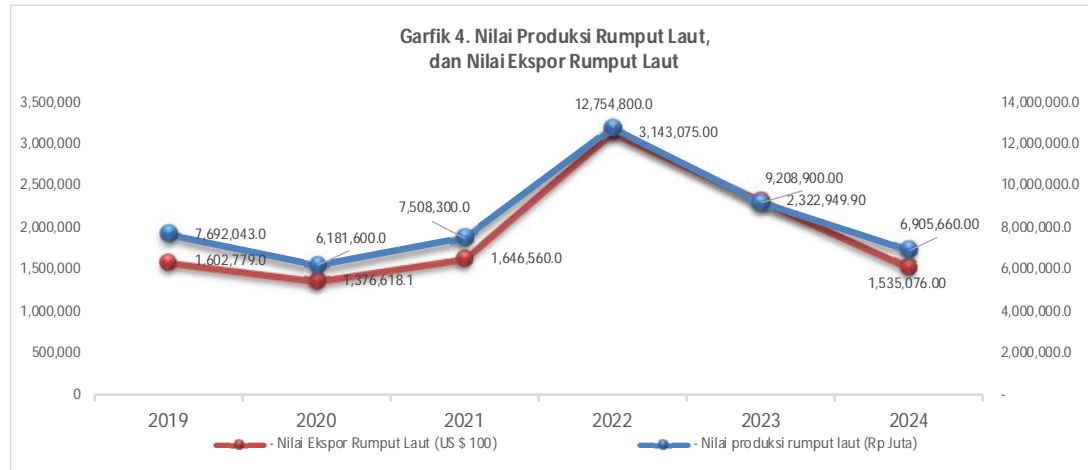
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024-2026)	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan terhadap Ekspor Sulawesi Selatan (%)	28,27	27,65	25,88	18,79	18,27	22,55	81,02	23,34	78,27

Tabel 11.  
Realisasi Ekspor dan Nilai Ekspor Perikanan Tahun 2020 - 2024

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor perikanan (Ton)	158.416,5	179.019,0	191.325,3	200.926,60	202.045,50
Rumput laut	134.818,7	152.276,8	165.000,7	180.027,48	173.301,0
Udang	8.107,4	9.093,1	8.392,5	6.591,03	6.357,70
Tuna Cakalang Tongkol	2.474,6	1.880,1	3.305,9	2.567,5	2.964,30
Ikan lainnya	12.578,5	15.769,0	14.626,2	11.740,78	19.422,50
Nilai Ekspor Perikanan US \$ (1000)	339.002,9	397.787,7	528.397,7	416.746,76	372.471,22
Rumput laut	137.661,8	164.656,0	314.307,5	232.294,99	153.507,6
Udang	75.829,1	82.272,1	75.301,2	54.282,48	50.878,1
Tuna Cakalang Tongkol	23.292,2	17.766,8	32.814,8	25.160,67	29.975,53
Ikan lainnya	101.491,3	96.345,5	105.974,2	105.008,62	138.109,99
Nilai Ekspor Sul Sel US \$ (juta)	1.199,36	1.438,6	2.041,55	2.218,47	2.038,97
<b>Kontribusi Nilai Ekspor Perikanan (%)</b>	<b>28,27</b>	<b>27,65</b>	<b>25,68</b>	<b>18,79</b>	<b>18,27</b>

Kontribusi nilai ekspor perikanan Sulawesi Selatan terhadap nilai ekspor Sulawesi Selatan sebesar 18,27 % lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2023 sebesar 18,79 %. Hal tersebut dipengaruhi oleh penurunan nilai ekspor perikanan sebesar 10,62 %, dimana tahun 2024 sebesar 372,47 juta US\$ dibandingkan tahun 2023 sebesar 416,75 juta US\$ . Salah satu komoditi ekspor perikanan adalah rumput laut yang berkontribusi sekitar 85 % - 89 % terhadap total volume ekspor perikanan dan juga berkontribusi sekitar 40 % - 59 % terhadap nilai ekspor perikanan. Terjadi Penurunan volume ekspor rumput sebesar 3,74 % yaitu 180.027,48 ton tahun 2023 menjadi 173,301 ton tahun 2024 dengan penurunan nilai ekspor rumput laut sebesar 33,92 % yaitu di tahun 2024 sebesar 153,51 juta US\$ dibandingkan tahun 2023 sebesar 232,29 juta US\$. Jika melihat pada grafik trend nilai produksi rumput laut dan nilai ekspor rumput laut terlihat

trend yang sama, hal tersebut menunjukkan bahwa **nilai produksi rumput laut sangat dipengaruhi oleh nilai ekspor rumput laut.**



Beberapa upaya yang dilakukan adalah aktif dalam kegiatan pameran sebagai upaya promosi *“branding”* produk perikanan Sulawesi Selatan dan pembinaan kualitas proses dari hulu hingga hilir menjadi hal penting untuk meningkatkan daya saing.

Berikut program pengampuh dan indikator untuk pencapaian target sasaran I, IKU Kontribusi PDRB Perikanan berupa nilai produksi perikanan (nilai produksi tangkap dan nilai produksi budidaya) sebagaimana terlampir tabel 12 dibawah.

Tabel 12.  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis I IKU I dan IKU 2

Sasaran Srategis I	Meningkatnya Produktivitas Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan
IKU I IKU 2	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sulawesi Selatan Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulawesi Selatan
Program Pengampuh	Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengelolaan perikanan tangkap
Indikator Kinerja Pembentuk	Nilai produksi budidaya Nilai Produksi tangkap

### a. Nilai Produksi perikanan budidaya

Tabel 13.  
Capaian Kinerja Indikator Nilai produksi Budidaya

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024-2026)	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai produksi budidaya (Rp M)	13,785.5	15.878,28	21.712,6	18.313,86	16.,753,67	21.850,16	76,68	22.530,90	74,36

Nilai produksi perikanan budidaya mencapai target 76,68 % dan turun 8,52 % dibandingkan tahun 2023. Penurunan nilai produksi perikanan budidaya sangat dipengaruhi penurunan nilai produksi rumput laut karena produksi rumput laut berkontribusi sekitar 89-90 % terhadap produksi budidaya dan berkontribusi sekitar 40 -50 % terhadap nilai produksi budidaya. Tahun 2023 harga rata-rata rumput laut *Euchema Cottonii* kondisi basah Rp 3.484 dan kering Rp 20.900 sedangkan pada tahun 2024 harga harga rata-rata rumput laut *Euchema Cottonii* kondisi basah Rp 2.400 dan kering Rp 14.500. Jika dilihat dari harga ekspor rumput laut tahun 2023 sebesar 1,23 US \$ per kg turun di tahun 2024 menjadi 0,89 US\$ per kg. Sebagai salah satu komoditi ekspor, harga rumput laut sangat dipengaruhi harga permintaan pasar negara tujuan ekspor. Perlu menjadi perhatian adalah memastikan kualitas rumput laut agar mampu bersaing dengan negara produsen rumput laut lainnya. Upaya yang perlu dilakukan adalah pembinaan kepada pembudidaya terkait perlunya memperhatikan kualitas rumput laut yang dimulai dari proses budidaya, seperti menggunakan bibit berkualitas, melakukan panen tepat waktu dan memperhatikan penanganan (proses) pasca panen rumput laut sesuai standar (pengeringan sampai dengan pengemasan).

## b. Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Tabel 14.  
Capaian Kinerja Indikator Nilai Produksi Perikanan Tangkap

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024-2026)	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai produksi perikanan tangkap (Rp M)	8.678,9	10.679,9	11.812,5	13.795,77	14.268,48	11.933,56	119,57	11.991,43	118,99

Nilai produksi perikanan tangkap mencapai target dengan persentase sebesar 119,57 %, nilai tersebut naik 3,43 % bila dibandingkan dengan tahun 2023. Pada kurun waktu 2020-2024 nilai produksi tangkap terus meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 13,68 %. Nilai produksi penangkapan ikan di laut naik 1,03 % dan nilai produksi perikanan di perairan umum sebesar 19,62 %. **Kontribusi peningkatan nilai produksi perikanan tangkap berasal dari komoditi unggulan perikanan tangkap yaitu Tuna Tongkol dan Cakalang (TTC) yang nilai produksinya naik dengan peningkatan 2,90 % dan gurita naik 209 % dibandingkan tahun 2022. Keberhasilan pencapaian indikator didukung oleh pelaksanaan kegiatan peningkatan produktivitas antara lain apartemen ikan dan rumpon ikan serta penyediaan sarana pelabuhan ikan untuk memudahkan nelayan memasarkan hasil tangkapan dengan harga yang baik.**

### INDIKATOR 3

### PRODUKSI PERIKANAN

Produksi perikanan terdiri dari produksi perikanan budidaya, produksi perikanan tangkap dan produksi garam. Jumlah hasil produksi perikanan budidaya merupakan produksi yang dihasilkan oleh seluruh kabupaten/kota yang meliputi perikanan tawar, payau

dan laut (termasuk rumput laut) dan produksi garam dari kabupaten/kota penghasil garam, sedangkan untuk jumlah produksi perikanan tangkap berasal dari produksi perikanan tangkap laut dan perairan umum daratan. Data produksi perikanan diperoleh dengan rumus :

$$\text{Produksi Perikanan} = \text{Prod.Kab/Kota 1} + \text{Prod.Kab/Kota II} + \text{Prod.Kab/Kota III} + \dots \text{dst}$$

$$X_{\text{tot}} = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$$

Tabel 15  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran I Produksi Perikanan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2024			Target Akhir Renstra (2024-2026)	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Produksi Perikanan (Ton)	4.147.630,5	4.500.393,56	4.536.058,18	4.735.254,38	4.869.707,84	4.779.259,3	101,89	4.974.039,4	97,90

Produksi perikanan mencapai target sebesar 101,89 % dan naik 2,84 % dibandingkan tahun 2023. Kurun waktu 2020-2024 pertumbuhan produksi perikanan terus meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 3,81 %. Peningkatan produksi perikanan didukung dari peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 1,34 % dan perikanan budidaya sebesar 4,36 %. Adapun produksi Perikanan tangkap terbagi atas penangkapan ikan di laut dengan tingkat kenaikan sebesar 0,9 % dan penangkapan ikan di perairan umum dengan kenaikan sebesar 6,0 %. Untuk sektor produksi Perikanan budidaya didukung dari budidaya laut dengan komoditi rumput laut dengan angka kenaikan sebesar 4,11 % serta budidaya tambak dengan angka kenaikan





sebesar 4,9 % dimana disumbangkan beberapa komoditi seperti ikan bandeng dengan kenaikan sebesar 10,7 % dan udang dengan kenaikan sebesar 0,7 %.

Tabel 16.  
Realisasi produksi perikanan tangkap , produksi budidaya dan produksi garam tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja	2020	2021	2022	2023	2024	Target 2024	Capaian (%)
Produksi perikanan budiaya (ton)	3.713.111,8	4.081.480,5	4.095.934,7	4.115.586,5	4.294.870,7	4.331.299,7	99,16
produksi perikanan tangkap (ton)	389.208,2	417.410,7	436.735,7	504.709,0	511.455,2	442.959,6	115,46
Produksi Garam (ton)	45.310,5	1.283,15	3.387,66	114.959,88	48.018,64	5.000	960,37
Total Produksi Perikanan	4.147.630,5	4.500.174,4	4.536.058,06	4.735.254,38	4.854.344,54	4.779.259,3	101,57

Keberhasilan pencapaian target kinerja didukung pelaksanaan kegiatan prioritas **“aksi penebaran benih ikan”** yaitu telah dilaksanakan penebaran benih ikan sebanyak 4,9 juta ekor di perairan umum daratan seperti di cekdam, embung dan rawa sebagai upaya dalam **mendukung program pusat yaitu program ketahanan pangan** yang bertujuan untuk meningkatkan produksi ikan di PUD. Selain itu terdapat bantuan sarana penangkapan ikan dilaut seperti rumpon dengan jumlah 14 unit, hal ini sejalan dengan beberapa hasil kajian yang telah dilakukan bahwa dengan adanya rumpon berdampak terhadap peningkatan produksi ikan pada suatu kawasan perairan sehingga berpengaruh terhadap peningkatan produktivitas nelayan. Bantuan sarana penangkapan ikan di perairan umum berupa mesin kapal 10 PK 4 unit dan alat tangkap gillnet 5 unit, pengembangan fasilitas pelabuhan perikanan di 3 pelabuhan, pengembangan budidaya rumput laut 255 paket, penyediaan bibit udang unggul melalui UPT PBAPL , benih ikan air tawar melalui Instalasi Lajoa Soppeng. Berikut program pengampuh dan indikator untuk pencapaian target sasaran I, IKU Produksi perikanan.

Tabel 17.  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis I IKU III

Sasaran Strategis I	Meningkatnya Produksi dengan Menambah Jumlah Produksi dan Produktivitas Produksi
IKU 3	Produksi Perikanan
Indikator Kinerja Pembentuk	Produksi perikanan budidaya
	Produksi perikanan tangkap
	Produksi garam
	Persentase ketersediaan benur berkualitas
	Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan
	Persentase pelabuhan perikanan yang memenuhi standar operasional
Program Pengampuh	Program pengelolaan perikanan tangkap Program pengelolaan perikanan budidaya Program pengelolaan kelautan , pesisir dan pulau-pulau kecil

#### a. Produksi Perikanan Budidaya

Produksi perikanan budidaya sebesar 4.310.234,0 ton mencapai target 99,51 % dan mengalami kenaikan sebesar 4,36 % apabila dibandingkan pada tahun 2023 dengan jumlah sebesar 4.115.586,5 ton. Persentase peningkatan rata-rata produksi pada kurun waktu 2020-2024 sebesar 4,21 % dan jika dibandingkan dengan target nasional sebesar 4.243.467 ton maka telah mencapai angka sebesar 97,28 %. Produksi perikanan budidaya didukung dari sektor budidaya laut dengan jumlah produksi sebesar 2.783.332,5 ton (persentase kenaikan sebesar 3,5 %), sektor budidaya tambak dengan nilai produksi sebesar 1.487.373,2 ton (persentase kenaikan 4,9 %) khususnya produksi budidaya udang sebesar 67.167,2 ton (persentase kenaikan sebesar 0,7 %) , produksi budidaya air tawar sebesar 17.557 ton (persentase kenaikan sebesar 8,4 %). Tidak tercapainya target produksi perikanan budidaya disebabkan karena adanya perlambatan terhadap pertumbuhan komoditi perikanan budidaya. Hal tersebut berdasarkan **realisasi produksi per kabupaten/kota yang mengalami penurunan antara lain : Kota Makassar, Kab. Pinrang, Kab. Luwu Timur,**

dan Kota Palopo. Berdasarkan Informasi dari Kabupaten/Kota khususnya petugas statistik beberapa permasalahan yang mempengaruhi produksi budidaya antara lain : terjadinya perubahan iklim yang berpengaruh terhadap kualitas air laut sehingga berdampak terhadap pertumbuhan rumput laut (terkena ice ice serta teritip) dan budidaya tambak, selain itu dibutuhkan perbaikan irigasi tambak untuk sirkulasi air, faktor fluktuasi harga bibit rumput laut lebih mahal dibandingkan harga jual serta alih fungsi lahan tambak yang terjadi di Kota Makassar dan Luwu Timur.

Produksi rumput laut memberikan kontribusi paling besar terhadap total produksi perikanan budidaya yaitu berkisar 89 % - 90 %. Pencapaian volume produksi perikanan budidaya didukung kegiatan bantuan bibit, sarana prasarana budidaya, serta pembinaan dan pendampingan teknis secara rutin (Tenaga pendamping Budidaya ) untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal, pengujian kesehatan ikan dan lingkungan dan pendampingan CBIB.

Tabel 18.  
Perkembangan komoditi unggulan budidaya tahun 2020 -2024

Komoditi	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rumput laut basah (ton)	3,441.138,7	3.786.411,7	3.796.733,3	3.844.803,38	4.014.695,1
Udang (ton)	50.876,1	54.974,6	61.446,2	67.295,15	68.577,5
Bandeng (ton)	193.589,2	211.225,4	206.091,4	173.239,1	193.873,1

Tabel 19.  
Realisasi produksi perikanan budidaya per kabupaten/kota tahun 2021 - 2024

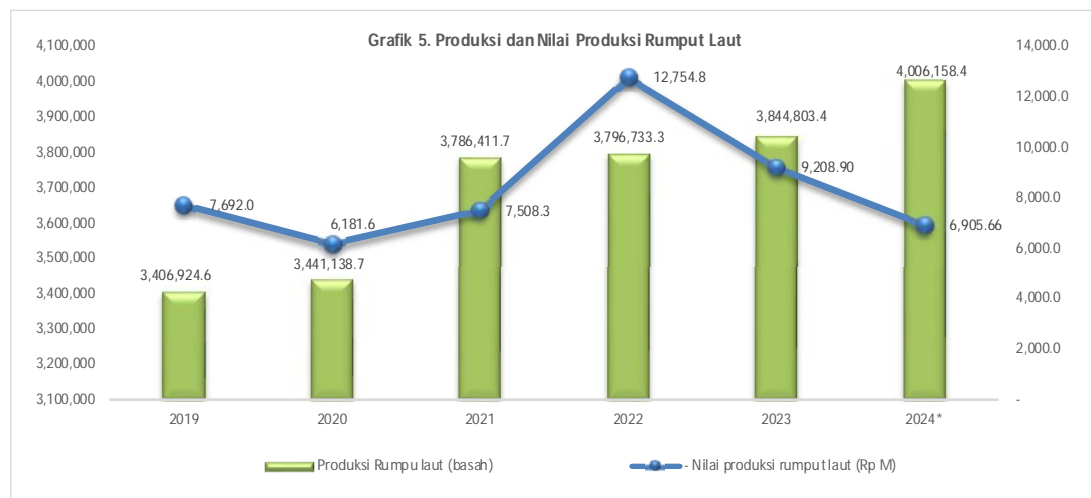
No	Kabupaten	Tahun			
		2024	2023	2022	2021
1	Luwu	652.012,3	647.807,6	641.850,7	627,586.9
2	Luwu Utara	257.767,4	249.050,6	240,762.5	232,620.3
3	Wajo	519.186,5	514.297,4	509,656.9	505,573.4

No	Kabupaten	Tahun			
		2024	2023	2022	2021
4	Bone	560.874,2	522.110,9	486,732.1	450,181.0
5	Sinjai	52.098,7	47.208,0	43,836.4	48,174.3
6	Bulukumba	221.538,8	214.799,0	195,758	228,920.0
7	Selayar	508,0	469,4	543.4	522.8
8	Bantaeng	88.851,8	90.142,9	89,375.3	86,575.3
9	Jenepono	272.014,2	246.403,8	257,230.9	257,604.7
10	Takalar	622.997,9	604.092,3	596,374.7	590,272.0
11	Makassar	1.519,6	1.528,4	1,928.9	1,506.7
12	Maros	30.710,2	29.864,9	28,404.0	27,000.7
13	Pangkep	418.039,1	311.560,7	427,456.3	473,025.4
14	Barru	6.537,6	6.469,2	6,450.1	6,301.1
15	Pare Pare	91,5	66,8	62.1	40.9
16	Pinrang	69.835,6	69.882,2	67,357.0	64,553.1
17	Gowa	1.190,4	1.116,6	975.4	973.6
18	Luwu Timur	377.110,8	378.996,7	318,944.6	315,590.1
19	Palopo	151.807,1	174.735,9	176,078.6	158,518.8
20	Sidrap	1.488,5	1.216,4	1,488,3	1,350.9
21	Enrekang	1.126,7	998	1,848.1	1,836.0
22	Soppeng	445,7	373,4	444.1	436.6
23	Tana Toraja	877,1	796,4	750.3	692.0
24	Toraja Utara	1.598,0	1.599,6	1,626.0	1,624.00
<b>Total</b>		<b>4.310.234,0</b>	<b>4.115.586,5</b>	<b>4.115.586,5</b>	<b>4.081.480,50</b>

Komoditas unggulan budidaya Provinsi Sulawesi Selatan dengan rincian per komoditas unggulan sebagai berikut.

## Rumput Laut

Pada tahun 2024 produksi rumput laut mengalami kenaikan sebesar 4,11 % dibandingkan tahun 2023. Selama kurun waktu 2019 - 2024 produksi budidaya rumput laut terus meningkat dengan peningkatan rata-rata 4,17 %. Namun terdapat beberapa Kabupaten yang mengalami penurunan produksi rumput laut antara lain : Kab. Bantaeng, Barru, Pinrang, Luwu Timur. Berdasarkan informasi yang diperoleh Kabupaten tersebut mengalami **produksi rumput laut yang kurang berkembang dan mati disebabkan serangan penyakit *ice ice* dan teritip serta harga rumput laut yang rendah mempengaruhi animo masyarakat.**



**Upaya yang telah dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi dan nilai produksi rumput laut adalah bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut untuk meningkatkan produktivitas pembudidaya. Bantuan tersebut berupa bibit rumput laut berkualitas (telah dicek untuk memastikan kualitas bibit oleh Tim Teknis Budidaya). Salah satu kunci keberhasilan adalah pendampingan lapangan oleh Tim Pendamping kabupaten /kota dimulai dari identifikasi kelompok penerima, proses produksi hingga pasca panen dan pelaporan.**

Tabel 20  
Perkembangan produksi rumput laut per kab/kota tahun 2020 -2024

NO	Kabupaten	RUMPUT LAUT				
		Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2021	Tahun 2020
1	Luwu	636.144,4	632.932,7	627.984,2	614.258,4	612.532,2
2	Luwu Utara	245.114,7	236.825,3	228.950,1	221.207,8	213.848,7
3	Wajo	490.910,8	486.990,9	483.088,6	479.632,2	476.078,9
4	Bone	435.739,0	416.464,0	366.491,0	337.592,2	286.767,2
5	Sinjai	51.901,0	46.969,7	43.400,5	47.823,8	45.976,4
6	Bulukumba	215.341,9	208.818,2	189.854,1	221.980,9	192.250,4
7	Selayar	349,4	315,6	381,4	359,1	642,1
8	Bantaeng	88.686,3	89.955,9	89.164,7	86.313	66.419,0
9	Jeneponto	268.312,4	241.609,6	252.795,5	253.389,9	231.754,4
10	Takalar	619.864,6	601.553,2	593.395,5	587.061	409.117,3
11	Maros	16.581,0	15.827,0	14.150,0	12.870	12.360,5
12	Pangkep	394.900	295.865,0	407.330	450.011	420.952,0
13	Barru	1.197,7	1.206,0	949,9	667,7	680
14	Pare-pare	26,4	9,6	7,9	-	-
14	Pinrang	40.549,3	36.170,7	23.641,4	19.399,1	14.243,7
15	Gowa	-	-	-	20	-
15	Luwu Timur	357.881,8	359.531,4	299.808,5	296.267,1	298.712,0
16	Palopo	151.194,2	173.858,4	175.340,0	157.558,4	123.732,4
<b>TOTAL</b>		<b>4.014.695,1</b>	<b>3.796.733,3</b>	<b>3.844.803,2</b>	<b>3.796.733,3</b>	<b>3.796.733,3</b>

Pada tahun 2024 disalurkan bantuan sarana prasarana budidaya rumput laut sebanyak 255 paket kepada 25 kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang tersebar pada Kabupaten Wajo sebanyak 84 paket untuk 8 pokdakan, Kabupaten Luwu sebanyak 41 paket

untuk 4 pokdakan, Kabupaten Barru sebanyak 70 paket untuk 7 pokdakan dan Kabupaten Bantaeng sebanyak 60 paket untuk 6 pokdakan. Salah satu item yang diberikan pada Bantuan sarana dan prasarana budidaya rumput laut adalah pelampung ramah lingkungan dan dapat dipakai berulang kali sehingga mengurangi potensi sampah plastik di laut guna **mendukung ekonomi biru**. Pada tahun 2020 sampai dengan 2023 Provinsi Sulawesi Selatan dinobatkan pada peringkat I sebagai penghasil rumput laut terbesar nasional.

**Udang dan Udang Windu**

Produksi Komoditi unggulan udang pada tahun 2024 sebesar 68.577,5 ton, mengalami kenaikan 2,78 % dibandingkan tahun 2023 sebesar 66.723,1 ton. Hal tersebut didukung dengan peningkatan produksi udang windu sebesar 4,46 %. Berdasarkan data statistik tahun 2024 beberapa kabupaten yang mengalami peningkatan produksi udang windu antara lain: Kabupaten Luwu Utara, Wajo, Bulukumba, Jeneponto, Pangkep dan Luwu Timur, Berdasarkan informasi dari Kabupaten/Kota salah satu yang berpengaruh terhadap peningkatan produksi udang windu adalah kondisi tambak yang cukup baik serta harga udang windu yang cukup tinggi yakni Rp 85.000 hingga Rp 100.000 per kilogram meningkatkan antusiasme pembudidaya.

Adapun upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka peningkatan produksi udang adalah Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya untuk pemantauan penyakit ikan serta pemantauan lingkungan budidaya. Selain itu dilakukan pemantauan dan pembinaan Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB).

Tabel 21.  
Perkembangan produksi udang windu kab/kota tahun 2020 -2024

NO	KABUPATEN	PRDOKSI UDANG WINDU TAHUN – n				
		2024	2023	2022	2021	2020
1	Luwu	230,3	236,0	360,9	424,8	436,8
2	Luwu Utara	636,0	614,5	593,8	574,4	526,2

NO	KABUPATEN	PRDOKSI UDANG WINDU TAHUN – n				
		2024	2023	2022	2021	2020
3	Wajo	318	271,1	213,8	146,1	97,1
4	Bone	3,078,0	2.867	2.240	1.887,3	897,8
5	Sinjai	3,3	3,3	6,3	16,4	62,0
6	Bulukumba	378,9	367,1	401,4	581	499,1
7	Selayar	6,8	5,9	7,2	10	9,6
8	Bantaeng	5,7	5,8	6,7	7,0	7,2
9	Jeneponto	323,4	263,6	295,5	293,6	316,9
10	Takalar	161,8	153,1	167,1	206,3	218,4
11	Makassar	23,2	17,0	84,3	199,1	319,7
12	Maros	1759,6	1.951,6	1.915,3	1.857,4	1.820,5
13	Pangkep	850,0	502,0	1.038,5	1.261,7	1.046,0
14	Barru	41,3	57,7	97,4	99,6	100
15	Pinrang	889,8	1,034,6	2.652,7	2.652,7	3.621,9
16	Gowa	30,2	31,3	24,6	24,6	48,5
17	Luwu Timur	499,8	489,0	552,8	549,3	560,5
18	Palopo	0,6	5,9	4,2	7,1	7,2
<b>TOTAL</b>		<b>9.236,6</b>	<b>8.876,6</b>	<b>10.662,4</b>	<b>11.457,5</b>	<b>10.595,4</b>

Pada tahun 2020 Provinsi Sulawesi Selatan dinobatkan pada peringkat VII sebagai penghasil udang nasional terbesar, kemudian pada tahun 2021 berada pada peringkat VI dan pada tahun 2022 – 2023 berada pada peringkat IV.

#### Persentase Ketersediaan Benur Udang Berkualitas

Capaian ketersediaan benur berkualitas pada tahun 2024 terealisasi sebesar 6.78 %. Capaian angka ini lebih rendah bila dibandingkan pada tahun 2023 yakni sebesar 78,51 %. Target produksi benur UPT PBAPL sebesar 20.000.000 ekor terealisasi 1.355.000 ekor



(siklus I). Rendahnya capaian realisasi disebabkan keterlambatan pengadaan belanja operasional benih (benur) untuk mendukung operasional siklus ke II akibat adanya kebijakan refocusing anggaran sehingga pelaksanaan kegiatan dihentikan sementara dan menunggu DPA perubahan. Adapun DPA perubahan dikeluarkan di pertengahan bulan November 2024 kegiatan tidak terlaksana karena proses pengadaan yang membutuhkan waktu. Ketersediaan benur berkualitas adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan UPT PBAPL dalam rangka pembinaan kepada masyarakat berupa bantuan benur dan juga sebagai sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2024 produksi benur berkualitas terealisasi sebanyak 1.355.000 ekor lebih rendah dibandingkan realisasi pada tahun 2023 dengan jumlah 11.258.000 ekor . Adapun upaya yang dilakukan untuk menunjang keberhasilan ketersediaan benur berkualitas adalah dukungan operasional (pengadaan induk berkualitas, pakan dan obat-obatan), jaminan bebas virus melalui hasil uji PCR agar dapat menjamin kualitas benur yang beredar di Sulawesi Selatan guna meningkatkan keberhasilan usaha budidaya dan minat pembeli untuk menggunakan benur hasil produksi dari UPT PBAPL, penyediaan prasarana seperti laboratorium untuk menunjang aktivitas UPT PBAPL.

Tabel 22.  
Ketersediaan Benur oleh UPT PBAPL tahun 2021 -2024

Tahun	Target (ekor)			Realisasi (ekor)			Capaian (%)		
	Penjualan (PAD)	Bantuan	Total	Penjualan (PAD)	Bantuan	Total	Penjualan (PAD)	Bantuan	Total
2021	20.000.000	6.500.000	26.500.000	20.834.500	7.280.000	28.114.500	104,17	112,0	106,09
2022	14.500.000	7.500.000	22.000.000	9.682.000	7.590.000	17.272.000	66,77	101,2	78,51
2023	9.100.000	900.000	10.000.000	10.358.000	900.000	11.258.000	113,28	100	112,58
2024	10.000.000	10.000.000	20.000.000	1.355.000	0	1.355.000	133,55	0	6,78

UPT Perikanan Budidaya Air Payau Laut yang merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendukung

visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah melaksanakan sejumlah upaya dan kegiatan yang terkait dengan pengembangan budidaya perikanan khususnya budidaya air payau dan laut. Ketersediaan benur berkualitas adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan UPT PBAPL dalam rangka pembinaan ke masyarakat berupa bantuan benur dan sebagai sumber penerimaan PAD.

### **Produksi Perikanan Tangkap**

Produksi perikanan tangkap mencapai realisasi sebesar 115,46 % dari target dan mengalami kenaikan sebesar 1,34 % dibandingkan dengan tahun 2023. Dimana peningkatan rata-rata produksi sebesar 6,61 % dalam rentang tahun 2020-2024. Nilai produksi perikanan tangkap terdiri dari produksi perikanan laut sebesar 464.976,7 ton dengan kenaikan sebesar 0,9 % dibandingkan tahun 2023 dengan angka produksi sebesar 460.854 ton. Untuk angka produksi perikanan tangkap pada perairan umum sebesar 46.478.6 ton dan terjadi kenaikan 6,0 % apabila dibandingkan produksi perikanan tangkap pada tahun 2023 dengan produksi sebesar 43.851,2 ton. Adapun komoditi unggulan perikanan tangkap mengalami peningkatan produksi seperti ikan tuna mengalami kenaikan sebesar 5,31 %, ikan cakalang sebesar 1,39 %, ikan kakap sebesar 5,40 % dan kerapu sebesar 7,72 %. Produksi perikanan tangkap sangat dipengaruhi oleh musim penangkapan ikan sehingga terdapat beberapa komoditi yang turun seperti gurita mengalami penurunan sebesar 29,33 % atau produksi tangkapan gurita sebesar 4.573,5 ton pada tahun 2023 turun menjadi 3.231,9 ton di tahun 2024. Kemudian komoditi ikan tongkol juga mengalami penurunan produksi. Dimana produksi tahun 2023 sebesar 28.816,8 ton menurun menjadi 26.462,2 ton di tahun 2024 atau terjadi penurunan sebesar 8,17 %. Berdasarkan data yang ada, beberapa kabupaten/kota yang mengalami penurunan produksi perikanan tangkap antara lain: Kabupaten Wajo, Kabupaten Sinjai, Kabupaten Bantaeng, Kota Makassar, Kabupaten Maros, Kota Pare-Pare, Kabupaten Pinrang, Kabupaten Gowa, dan Kota Palopo. Berdasarkan informasi dari beberapa kabupaten /kota bahwa faktor iklim, cuaca dan musim

tangkap berdampak terhadap pengurangan jumlah trip penangkapan ikan sehingga beberapa komoditi mengalami penurunan.



Pemberian asuransi nelayan kematian dan kecelakaan kerja kepada 10.000 nelayan Sarana rumpon laut dalam 34 unit terdiri 15 unit (5 kelompok di kab. Sinjai), 15 unit (5 kelompok di kab. Selayar) dan 4 unit (2 kelompok di Kab. Bulukumba) sarana penangkapan ikan di PUD mesin kapal 10 PK (1 Kelompok di Kab.Sidrap), alat tangkap gillnet 5 unit (1 kelompok di kab. Sidrap)

### **Pelabuhan Memenuhi Standar Operasional**

Realisasi persentase pelabuhan perikanan memenuhi standar operasional sebesar 89,47 %. Hal tersebut masih sama bila dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Standar operasional pelabuhan perikanan harus memenuhi minimal 3 standar operasional yang dipersyaratkan antara lain yaitu telah operasional, penetapan kelas oleh kementerian, memiliki kelembagaan, memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran, menyusun wkopp dan menerapkan CPIB. Provinsi Sulawesi Selatan memiliki 19 pebuhan perikanan dengan yang memenuhi standar operisional sebanyak 17 pelabuhan.

Gambar 2.  
Daftar Pelabuhan Perikanan yang Memenuhi Standar Operasional tahun 2024

NO	NAMA PELABUHAN PERIKANAN	KABUPATEN/KOTA	PELABUHAN PERIKANAN MEMENUHI STANDAR OPERASIONAL SESUAI IKK LPPD PERMENDAGRI 28 TAHUN 2020					
			Telah operasional	Penetapan kelas oleh MKP	Memiliki Kelembagaan	Memiliki syahbandar atau petugas kesyahbandaran	Menyusun WKOPP	Menerapkan CPIB
<b>PELABUHAN WILAYAH II</b>								
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	√	X	√	√	X	X
2	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	√	X	√	√	X	X
3	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
4	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	√	X	√	√	X	X
5	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	√	√	√	√	X	X
6	Pelabuhan Perikanan Tanrusampe	Kab. Jeneponto	√	X	√	X	X	X
7	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	√	X	√	√	X	X
8	Pelabuhan Perikanan Benteng Somba Opu	Kab. Gowa	√	X	√	√	X	X
9	Pelabuhan Perikanan Bonehalang	Kab. Kep. Selayar	√	√	√	√	X	X
<b>PELABUHAN WILAYAH I</b>								
1	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Maros	√	X	√	√	X	X
2	Pelabuhan Perikanan Maccini Bajji	Kab. Pangkep	√	X	√	√	X	X
3	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	X	X	√	X	X	X
4	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	√	X	√	√	X	X
5	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Pare-pare	√	X	√	√	X	X
6	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	√	X	√	√	X	X
7	Pelabuhan Perikanan Ulo-Ulo	Kab. Luwu	√	X	√	√	X	X
8	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	√	X	√	√	X	X
9	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	√	X	√	√	X	X
10	Pelabuhan Perikanan Lero	Kab. Pinrang	√	X	√	√	X	X

Faktor pendorong keberhasilan adalah alokasi anggaran untuk mendukung penyediaan sarana prasarana pelabuhan dalam mendukung operasional pelabuhan dan Penetapan SK Kasatpel serta SK syahbandar untuk optimalisasi pelayanan di pelabuhan. Provinsi Sulawesi Selatan masih memiliki pelabuhan yang tidak memenuhi standar operasional yaitu pelabuhan perikanan Polejiwa Kab. Barru dan Pelabuhan Tanrusampe di Kabupaten Jeneponto. Adapun pelabuhan Polejiwa sejak dibangun oleh kabupaten dalam kondisi yang tidak operasional karena dibangun pada lokasi yang bukan tempat aktifitas nelayan. Sedangkan kondisi Pelabuhan Tanrusampe di Kabupaten Jeneponto di dominasi oleh armada kapal yang berada dibawah 5 GT sehingga tidak membutuhkan dokumen kesyahbandaran, oleh karena itu tidak ada penempatan syahbandar/petugas syahbandar di pelabuhan tersebut. Terkait kedua pelabuhan tersebut, maka perlu dibuat pertimbangan

teknis terkait pengembangan pelabuhan perikanan dimasa yang akan datang karena pengembangan pelabuhan atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun jumlah sarana prasarana yang telah terbangun di Pelabuhan perikanan hingga tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23.  
Pembangunan Sarana Prasarana Pelabuhan Tahun 2019-2024

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
1	Pelabuhan Perikanan Paotere	Kota Makassar	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
2	Pelabuhan Perikanan Labuang	Kab. Maros	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020)
3	Pelabuhan Perikanan Maccini Baji	Kab. Pangkep	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020) , pemasangan instalasi listrik (2023) ,rehab TPI (2024) Rehabilitasi Jalan dan Drainase Kompleks Pelabuhan Perikanan (2024)
4	Pelabuhan Perikanan Sumpang Binangae	Kab. Barru	Rehab TPI (2021) , rehab gedung TPI (2022), Tempat pembuangan sampah (2023), rehab gedung kantor PPI (2023)
5	Pelabuhan Perikanan Cempae	Kota Parepare	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehabilitasi Kantor 120 Meter PPI Cempae (2021)
6	Pelabuhan Perikanan Lonrae	Kab. Bone	Jalan Kompleks PPI Lonrae 312.5 Meter (2020) Rehab Kantor UPT Pelabuhan wil 1 (2021) , rehab TPI (2022), Jalan kompleks PPI (2022)
7	Pelabuhan Perikanan Balambang	Kab. Luwu	Jaringan instalasi listrik PPI (2021) Turap penahan tanah di PPI (2021) Fasilitas air (tawar) bersih (2021)
8	Pelabuhan Perikanan Pontap	Kota Palopo	Pengadaan air bersih (2019)

No	Nama PPI	Lokasi	Keterangan
9	Pelabuhan Perikanan Lappa	Kab. Sinjai	ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Lappa(2021), Rehab TPI (2023)
10	Pelabuhan Perikanan Kajang	Kab. Bulukumba	Rehabilitasi pelataran PPI Kajang (2019), Jaringan listrik PPI Kajang (2020), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehab TPI (2024)
11	Pelabuhan Perikanan Bontobahari	Kab. Bulukumba	jaringan instalasi listrik PPI Bontobahari (2019), Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), ABF 01 (2021), Rehabilitasi Cold Storage PPI Bontobahari(2022), Rehab TPI (2023)
12	Pelabuhan Perikanan Birea	Kab. Bantaeng	Pengadaan sarana dan prasarana air bersih (2020), Rehab Wisma Nelayan dan Penataan Lingkungan PPI Birea (2021) Rehab drainase (2023), Jaringan dan Instalasi Listrik (termasuk travo (2023)
13	Pelabuhan Perikanan Beba	Kab. Takalar	Penataan PPI Beba(2019), sarana operasional kesyahbandaran (2022), rahab TPI (2022). jaringan dan instalasi listrik (2022), Penyusunan Andalalin (2023), dokumen UKL UPL (2023), pembangunan IPAL (2023), Breakwater (2023), Fasilitasi air (tawar) bersih (sumur bor artesis, pompa, rumah pompa, instalasi air tawar, menara dan tank (fisik tidak selesai 46 %) (2023), Rehab drainase (2023), Breakwater tahap II (2024)
14.	Pelabuhan perikanan Bontobahari	Kab. Maros	Rehab TPI (2023)
15	Pelabuhan Perikanan Polejiwa	Kab. Barru	Pembuatan pagar (2023)

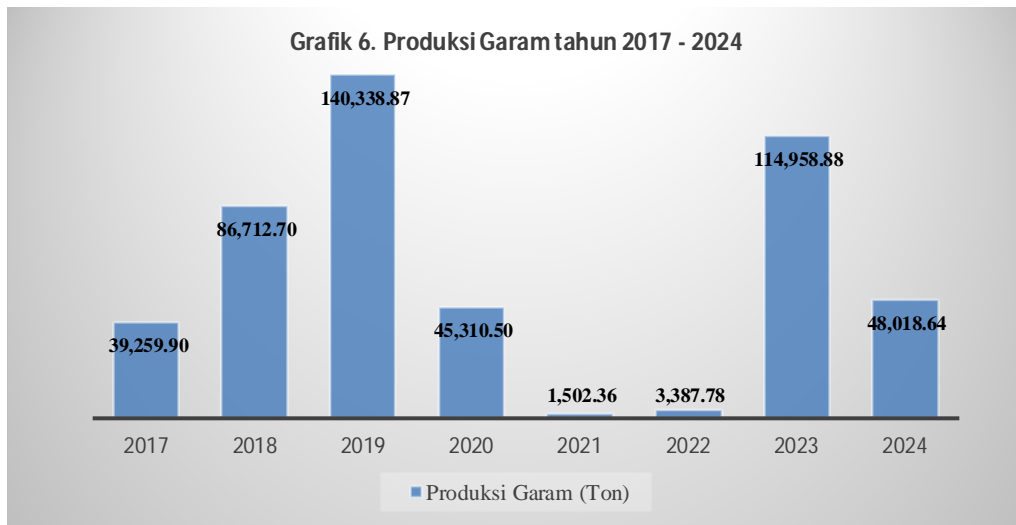




Rehabilitasi sarana prasarana pelabuhan berupa pembangunan *breakwater tahap II* di PPI Beba Takalar, rehabilitasi TPI di PPI Kajang dan PPI Maccini Baji Pangkep

### Produksi garam

Data sementara produksi garam pada tahun 2024 sebesar 48.018,64 ton dimana terjadi penurunan produksi garam sebesar 56,23 % apabila dibandingkan dengan capaian produksi tahun 2023 sebesar 114.958,88 ton. Gambaran produksi garam pada rentang tahun 2017-2023 menunjukkan angka produksi yang fluktuatif dimana produksi tertinggi pada tahun 2019 sebesar 140.338,87 ton dan angka produksi terendah pada tahun 2021 yaitu 1.502,36 ton. Hal ini disebabkan karena produksi garam rakyat sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca.



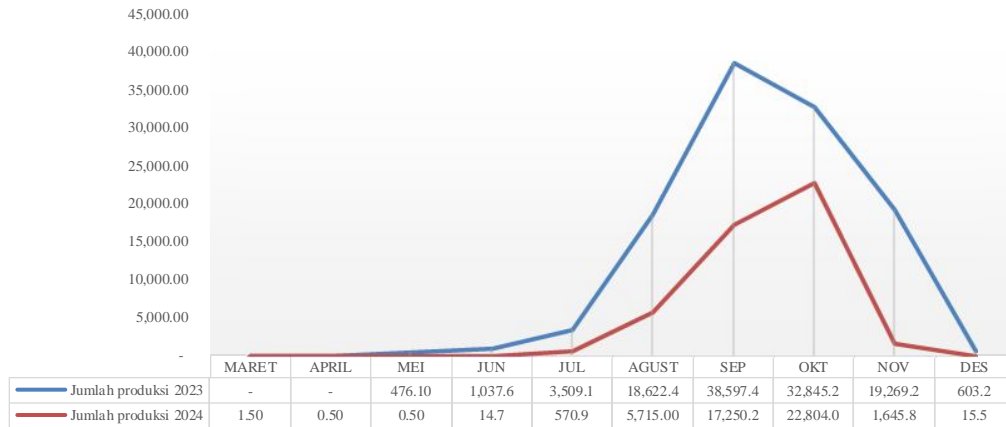
Tabel 24. Perkembangan produksi garam per kabupaten/kota tahun 2018 -2024

Kabupaten	Produksi Tahun –n						
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Selayar	115.71	156.21	43.10	3,15	3,35	22,4	35,15
Kab. Jeneponto	38,769.10	71,956.32	30,595.72	580,5	801,78	83.604	28.033,54
Kab. Takalar	11,104.50	22,358.86	4,264.43	852,65	600,52	14.335,9	11.306,5
Kab. Pangkep	36,723.40	45,719.98	10,404.26	66,0	1.982,0	16.920,0	8.643,39
Kab. Maros	-	147.50	3.00	0,01	0,009	77,6	0,066
Total	86,712.71	140,338.87	45,310.51	1,502.36	3.387,66	114.959,88	48.018,64

Kondisi cuaca yang tidak mendukung menyebabkan penurunan produksi hal ini terlihat pada data produksi bulanan terjadi penurunan produksi bulan Mei sampai dengan bulan Desember. Contoh di Kabupaten Jeneponto masih terjadi hujan di bulan Juli sehingga membutuhkan waktu dalam persiapan (memadatkan) lahan garam untuk memulai proses produksi.



Grafik 7. Produksi garam tahun bulan Maret - Desember Tahun 2023 dan Tahun 2024



Beberapa upaya yang dilakukan dalam peningkatan produksi garam adalah pemanfaatan teknologi produksi garam seperti penggunaan geomembrane (HDPE) dan penggunaan tunnel untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas garam. Selain itu dukungan regulasi berupa Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan tentang Rencana



Induk Pergaraman Daerah Tahun 2020-2024 yang sedang tahap proses penetapan pergub sebagai tindak lanjut Perpres 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional. Upaya peningkatan SDM petambak garam dilakukan dengan melakukan Sertifikasi petambak garam yang dibiayai oleh APBN. Kegiatan ini bertujuan agar pelaku usaha tambak garam mendapat pengakuan resmi atas kompetensi petambak dalam mengelola produksi garam, acara ini telah diikuti 20 orang petambak garam. Adapun Sertifikasi tersebut diberikan setelah petambak mengikuti pelatihan dan asesmen

kompetensi yang dikeluarkan BNSP (Badan Nasional sertifikat Profesi) yaitu Lembaga Sertifikat Profesi Kelautan dan Perikanan.

Untuk mendorong capaian produksi garam Provinsi Sulawesi Selatan dalam kurun waktu 2019 – 2024 maka telah dibangun sarana prasarana usaha garam berupa gudang garam sebanyak 20 unit, sarana iodisasi (mesin iodisasi garam) sebanyak 3 unit, geomembran sebanyak 14 paket dan 7 unit mesin pompa sesuai dengan kebutuhan kelompok usaha garam. Kondisi gudang garam sebelumnya sangat konvensional dan tidak sesuai standar, dapat dikatakan tidak layak digunakan untuk menyimpan atau menampung hasil produksi garam pada musim kemarau maupun musim penghujan. Dengan adanya pembangunan gudang garam rakyat bertujuan untuk menjaga harga garam agar tetap stabil disaat stok garam sedang melimpah. Selain itu upaya revitalisasi gudang garam rakyat sesuai dengan spesifikasi gudang tipe C pada SNI 8446:2017 bertujuan agar dapat mempertahankan kualitas garam yang tersimpan.



Sarana geomembran sebagai alas tambak garam mampu mempercepat kristalisasi garam sehingga panen lebih cepat dilakukan, kualitas warna garam lebih putih dan bersih karena tidak bersentuhan dengan tanah dasar.

Sarana tunnel garam merupakan sebuah sarana untuk mengkristalkan garam dengan cara membuat rangka kemudian ditutup dengan palstik UV dibagian atas sehingga menyerupai terowongan. Sarana tunnel garam diharapkan dapat meningkatkan produksi garam karena mampu beroperasi walaupun cuaca tidak mendukung, seperti pada saat musim penghujan.



### **Cakupan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan**

Jumlah sarana prasarana mendukung produksi perikanan terdiri dari sarana tambatan perahu, sarana prasarana garam. Tahun 2024 telah dilaksanakan gudang garam 4 unit, geomembran 3 dan tunnel 1. Sehingga capaian cakupan jumlah Sarana Prasarana yang mendukung produksi perikanan sampai dengan tahun 2024 sebanyak 58 unit dari target sampai dengan akhir perencanaan 107 unit atau sebesar 54,21 %. Faktor pendukung adalah adanya alokasi penganggaran DAK untuk mendukung peeningkatan produktivitas garam. Faktor penghambat adalah adanya refocusing anggaran tambatan perahu dan sarana gudang garam sehingga indikator belum bisa dicapai tahun 2025.

Kendala yang dihadapi pemenuhan sarana prasarana mendukung produksi perikanan tambatan perahu adalah kesesuaian lokasi yang dipersyaratkan, kesesuaian spesifikasi tambatan perahu, ketersediaan anggaran akibat refocusing anggaran di tahun 2020 dan ketersediaan SPD (surat penyediaan dana) tahun 2024 sehingga alokasi tambatan perahu dan sarpras garam tidak terlaksana. Upaya yang perlu dilakukan untuk mendukung ketersediaan sarana prasarana adalah koordinasi dan verifikasi awal ke lapangan untuk memastikan kesesuaian lokasi dan spesifikasi serta dukungan anggaran untuk pencapaian target.

Tabel 25.  
Sarana prasarana mendukung produksi perikanan 2020 -2024

Indikator	Realisasi				2024			Target Akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Cakupan ketersediaan sarana prasarana pendukung produksi perikanan	7,27	9,09	33,33	50,51	54,21	56,89	95,28	100	54,21

Sarana prasarana pendukung produksi perikanan berupa tambatan perahu yang dibangun untuk memudahkan perahu nelayan dalam melakukan bongkar muat hasil tangkapan maupun barang dan mempermudah naik turunnya nelayan. Kurun waktu 2019-2023 telah terbangun 18 unit tambatan perahu.



Desa Padang Kalua Kec. Bua Kab. Luwu



Pulau Polewali Desa Mattiro Labangeng Kec. Liukang Tuppabiring Kabupaten Pangkep



Sarana pendukung produksi lainnya adalah sarana prasarana garam seperti gudang garam , geomembran dan sarana iodisasi kurun waktu tahun 2019 - 2022 terealisasi 27 unit. (sarana prasarana garam telah dijelaskan di indikator sebelumnya)

### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja sasaran I**

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai target meningkatnya produktivitas **Empat Program** yaitu :

- 1) **Program pengelolaan perikanan budidaya** terdiri dari kegiatan :
  - a) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut dilaksanakan penyediaan sarana rumput laut 255 kepada 25 kelompok terdiri dari kab. wajo 84 paket, kab. Luwu 41 paket, Kab. Barru 70 paket, Kab. bantaeng 60 paket kepada 25 kelompok; Temu Tehnis Budidaya Rumput Laut diikuti 50 orang terdiri dari Tenaga Pendamping dan pejabat Pemerintah Setempat untuk melakukan koordinasi dan pembekalan teknis ke tenaga pendamping; Dukungan Operasional Keramba Jaring Apung untuk bibit ikan bandeng, bibit ikan kakap putih, Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas terlaksana 284 dokumen hasil uji ikan dan lingkungan budidaya, Rehabilitasi Laboratorium Perbenihan dan mess operator perbenihan
  - b) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di perairan darat dilaksanakan penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan Air Payau dan Tawar yaitu rehab



sarana prasaran perbenihan Rehab Gedung / Bangunan Instalasai Perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA, Rehabilitasi mess operator perbenihan DAK Dinas Kelautan dan Perikanan , Rehab Gedung / Bangunan Instalasai Perbenihan Air Tawar (BBI LAJOA), Rehab Tandon DAK Dinas Kelautan dan Perikanan. Penyediaan sarana Pembudidayaan Air payau dan Air Tawar berupa dukungan operasiona Instalasi air tawar Lajoa, Dukungan Operasional Perbenihan BBU Bojo.



2) Program pengelolaan perikanan tangkap terdiri dari kegiatan :

- a) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil dilaksanakan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan 1 dokumen; Sarana rumpon laut dalam 34 unit terdiri 15 unit (5 kelompok di kab. Sinjai), 15 unit (5 kelompok di kab. Selayar) dan 4 unit (2 kelompok di Kab. Bulukumba ), Pemberian asuransi nelayan kematian dan kecelakaan kerja kepada 10.000 nelayan



- b) Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah PUD yaitu Untuk mendukung peningkatan produktivitas di PUD dengan strukturisasi alat penangkapan ikan PUD berupa Prasarana Penangkapan Ikan di PUD [-] Kelompok Usaha Bersama Mesin Kapal 10 Pk , Sarana Penangkapan IKan di PUD [-] Kelompok Usaha Bersama Alat Tangkap Gill Net (Sejenis) Gillnet Pa Multimonofilamen 1,75 Inchi No. 0,26 Mm (25 Pice) 5 unit.
- c) Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT sebanyak 643 rekomendasi.
- d) Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 1.229 rekomendasi.

- e) Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi dilaksanakan Pengembangan sentra produksi perikanan pelabuhan perikanan berupa : 1) Pengembangan sarana pelabuhan di 3 PPI yaitu PPI Beba Takalar (jumlah nelayan 3.020 nelayan), PPI Maccini Baji Pangkep (jumlah nelayan 612 nelayan), PPI Kajang Bulukumba (jumlah nelayan 724 nelayan) 2) pelaksanaan Layanan kesyahbandaran . Upaya tersebut untuk memperlancar operasi penangkapan, pendaratan hasil perikanan, pengolahan dan pemasaran ikan, optimalisasi pendataan produksi perikanan di pelabuhan sebagai sentra produksi perikanan untuk mendukung fungsi pelabuhan yaitu fungsi pemerintahan dan perusahaan.
  - f) Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi sebanyak 666 rekomendasi
  - g) Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT sebanyak 1.260 rekomendasi
- 3) Program pengelolaan kelautan , pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari kegiatan :
- a) Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan untuk mendorong peningkatan produksi garam yaitu Sarana prasarana garam berupa tunnel 1 kelompok, bantuan geomembran 3 kelompok, gudang garam 4 kelompok.



## INDIKATOR 4 KONSUMSI IKAN

Konsumsi ikan adalah jumlah kebutuhan/permintaan ikan yang menggambarkan fungsi dari jumlah penduduk dan neraca permintaan ikan untuk konsumsi domestic. Ikan mencakup ikan segar dan olahan sesuai dengan ketentuan BPS. Formulasi untuk mengukur konsumsi ikan menggunakan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Konsumsi Ikan} = \frac{(\text{total produksi} - \text{produksi bukan bahan makanan}) - \text{ekspor} - 7\%}{(\text{Jumlah penduduk 2022} + \text{jumlah penduduk 2023} / 2)}$$

Keterangan : 7 % adalah data produk diantarpulau yang tak terhitung (range 0 – 15 %)

Tabel 26.  
Capaian Kinerja indikator sasaran Konsumsi Ikan Tahun 2024

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Tahun 2024			Akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Konsumsiikan (kg/kap/tahun )	65,5	68,3	69,5	71,10	72,60	72,48	100,17	75,41	95,88

Nilai sementara Konsumsi ikan sebesar 72,60 % mencapai target sebesar 100,17 % dan naik 2,01 % dibandingkan tahun 2023. Kurun waktu 2020-2024 angka konsumsi ikan terus naik dengan peningkatan rata-rata sebesar 6,12 %. Jika dibandingkan dengan target konsumsi ikan nasional untuk Sulawesi selatan sebesar 79.91 kg/kap/tahun capaian angka konsumsi ikan Sulawesi Selatan telah mencapai 90.48 % sedangkan secara nasional target AKI sebesar 62.05 telah mencapai 116.52 %.



Faktor pendorong tingginya angka konsumsi ikan karena Sulawesi Selatan memiliki masyarakat yang mengkonsumsi ikan cukup tinggi dan memiliki budaya makan ikan yang tinggi. Hal ini di dukung dengan pencapaian produksi perikanan tangkap, produksi budidaya dan peningkatan produksi olahan ikan konsumsi. Tidak tercapainya target disebabkan asumsi bahwa peningkatan produksi perikanan tangkap sebesar 2 % namun hanya mengalami peningkatan 1,34 %.

Upaya peningkatan konsumsi ikan merupakan program **untuk mendukung program pusat yaitu penurunan angka stunting** diantaranya adalah pelaksanaan Gemarikan di Kab. Tana Toraja dengan peserta 200 orang, Edukasi Gemarikan di Posyandu Binaan DKP yang menysasar 89 anak ballita/baduta, 5 ibu hamil serta anak terindikasi stunting 4 anak, Support Gemar Makan Ikan, dilaksanakan oleh Lantamal, Nasi Box Menu Ikan, 400 Pax.



Indikator kinerja pembentuk konsumsi ikan sebagaimana tabel 27.

Tabel 27  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Startegis I IKU 4 Angka Konsumsi Ikan

<b>Sasaran Stratis I</b>	<b>Meningkatnya Produktivitas dan Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan</b>
<b>IKU 3</b>	<b>Angka Konsumsi Ikan</b>
<b>Indikator Kinerja Pembentuk</b>	<b>Produksi olahan ikan konsumsi</b>
	<b>Nilai Produksi olahan ikan konsumsi</b>
	<b>Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan</b>
<b>Program Pengampuh</b>	<b>Program pengolahan dan dan pemasaran hasil perikanan</b>

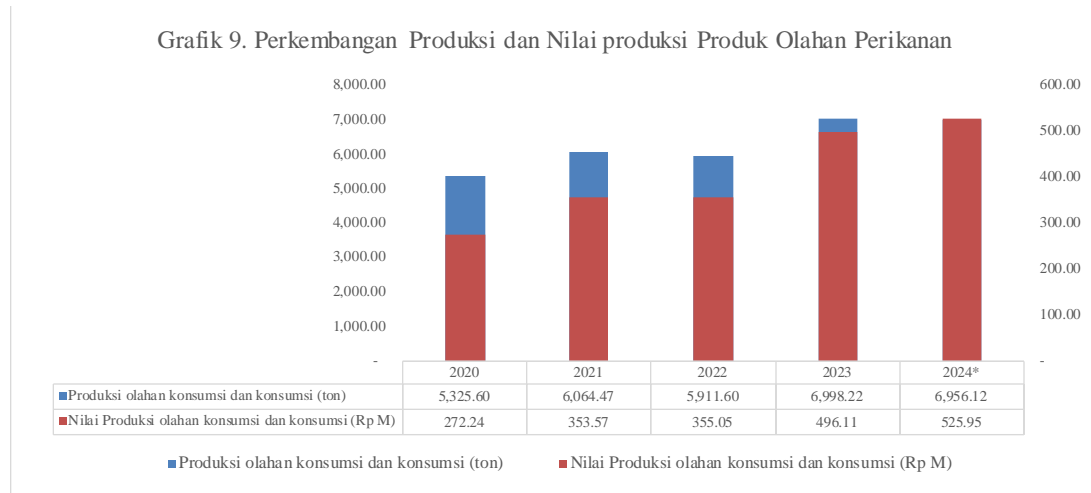
**a. Produksi dan nilai produksi olahan ikan konsumsi dan non konsumsi**

Tabel 28  
Realisasi Indikator kinerja Produksi Olahan dan Nilai produksi Olahan

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024	Target 2024	Capaian
Nilai produk olahan ikan k onsumsi (Rp M)	272,24	353,57	355,05	502,56	525,95	391,94	134,19
Produksi olahan ikan kons umsi (Ton)	5.235,6	6.064,47	5.911,6	7.235,83	6.956,12	6.956,12	113,10

Produksi olahan ikan konsumsi mencapai target 113.10 % namun mengalami perlambatan 0,60 % dibandingkan tahun 2023. Kuru waktu tahun 2020 – 2024 produksi olahan terus meningkat dengan peningkatan rata-rata sebesar 7,25 %. Penurunan produksi tahun 2024 disebabkan harga bahan baku olahan yang tinggi sehingga beberapa pelaku usaha membatasi produksinya sesuai permintaan saja. Produk olahan yang mengalami penurunan adalah produk olahan penggaraman/pengeringan ikan, pengolahan kerupuk/keripik/peyek ikan, dan pengolahan rumput laut. Produksi olahan ikan terbesar pada kegiatan penggaraman, pemindangan, dan pembekuan ikan. Jumlah UPI tersebar di 24

Kabupaten /Kota sebanyak 1.653 unit yang bergerak di fermentasi ikan, pelumatan daging /surimi, pembekuan ikan, pemindangan ikan, penanganan produk segar dan dingin, pengalengan ikan, pegasapan ikan, penggaraman ikan, pengolahan lainnya, serta pereduksian dan ekstraksi.



Upaya untuk meningkatkan konsumsi ikan adalah melakukan promosi produk melalui pameran diharapkan dapat menstimulasi perkembangan dan peningkatan produksi olahan. Pembinaan UPI dalam rangka penerbitan Sertifikat kelayakan pengolahan (SKP) yang diberikan kepada pelaku usaha pengolahan yang telah menerapkan cara pengolahan ikan yang baik (*good manufacturing practices*) dan memenuhi persyaratan prosedur operasi sanitasi standar. Manfaat SKP memberikan jaminan mutu dan keamanan pada produk perikanan yang diproduksi, memenuhi standar produk hasil perikanan yang dipersyaratkan (SNI untuk produk yang diperdagangkan di pasar dalam negeri atau standar negara *buyer* untuk produk yang diekspor) hingga memperluas pasar sehingga omzet meningkat.

Tabel 29  
Jumlah UPI, UPI ber SKP dan SKP terbit tahun 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Total UPI	1,126	1,190	1,425	1,565	1,543	1.653
Jumlah UPI Bersertifikat	97	56	98	91	108	128
SKP terbit (lembar)	268	158	352	199	320	241

Catatan : SKP terbit per 2 tahun sehingga yang terbit pada tahun ganjil 2021 kemungkinan besar mengajukan di tahun 2023

#### b. Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan

Pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan adalah pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan dan penerapan persyaratan Standar Nasional Indonesia (SNI) pada produk hasil perikanan yang dilaksanakan oleh UPT BPMPP. Tahun 2024 ditargetkan sertifikat hasil uji mutu dan Jumlah SKP dalam rangka pembinaan mutu sebanyak 1.470 sertifikat terdiri dari 1.400 sertifikat hasil uji mutu dan 70 Sertifikat Kelayakan pengolahan. Terealisasi 1.894 sertifikat terdiri dari 1.653 sertifikat hasil uji mutu dan 241 Sertifikat Kelayakan pengolahan

Tabel 30.  
Realisasi Indikator kinerja Persentase Pengujian Pembinaan Mutu Produk Perikanan

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024	Target Akhir RPJMD	Capaian
Jumlah sertifikat hasil uji mutu dan Jumlah SKP dalam rangka pembinaan mutu	1.492	1.056	1.123	1423	1894	-	-
Jumlah target sertifikat hasil uji mutu dan Jumlah SKP dalam rangka pembinaan mutu	1.500	1500	1500	1500	1470	-	-
Persentase pengujian (pembinaan) mutu produk perikanan (%)	*	60,32	76,65	97,40	128,84	100	128,84

Faktor pendorong capaian adalah adanya sub kontrak dari BPMPHKP semakin banyak, semakin banyak customer dari luar Provinsi Sulawesi Selatan melakukan pengujian, bertambahnya ruang lingkup parameter uji yang terakreditasi (misalnx arsen) dan parameter pengujian relatif murah (tarif retribusi sesuai perda no 1 tahun 2024) dan semua itu tidak terlepas dari adanya pelayanan melalui aplikasi e\_sejutaikan mudah diakses dan dapat dilakukan dimana saja sehingga proses layanan cepat, sampel djemput tanpa biaya dalam area makassar, waktu pengujian hanya 6 hari kerja untuk uji mikrobiologi dan kimia, 1 hari kerja untuk uji organoleptik, sertifikat uji bisa di download oleh customer melalui akun masing-masing.

UPT Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (UPT BPMPP) merupakan Unit Pelaksana Teknis di Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan yang melaksanakan pelayanan teknis operasional pengujian mutu dan keamanan produk perikanan, mengembangkan (diversifikasi) produk hasil perikanan, dan melaksanakan penerapan Standar Nasional Indonesia pada produk hasil perikanan.

Upaya yang dilakukan adalah UPT BPMPP menghadirkan **Inovasi Sejuta Ikan yang memudahkan pengurusan pelayanan Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan bagi eksportir ikan di Sulawesi Selatan dan menjadikan layanan menjadi cepat, ringkas, hemat, dan mudah.** Upaya Pelayanan pengujian mutu untuk memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan permintaan standar negara tujuan menjadi enam hari kerja yang sebelumnya 12 hari kerja. Sistem memangkas waktu pelayanan administrasi dan penerbitan sertifikat di persingkat. Bahkan, petugas UPT BPMPP menyediakan layanan jemput sampel dan antar sertifikat tanpa tambahan biaya (gratis) serta menyiapkan layanan pengaduan pengguna jasa.

**Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan Indikator kinerja sasaran**

Indikator meningkatnya konsumsi ikan dan daya saing produk kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan terdiri dari kegiatan :

- 1) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar dilaksanakan 1) Gemarikan di Kab. Tana Toraja dengan peserta 200 orang, Edukasi Gemarikan di Posyandu Binaan DKP yang menysasar 89 anak ballita/baduta, 5 ibu hamil serta anak terindikasi stunting 4 anak, Support Gemar Makan Ikan, dilaksanakan oleh Lantamal, Nasi Box Menu Ikan, 400 Pax 2) Penyediaan bahan pengujian



Layanan pengujian sampel di Laboratorium di UPT BPMPP mendukung Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar (Akreditasi ISO/IEC 17025:2017)





Berpartisipasi di Acara Hari Anak Nasional yang diselenggarakan oleh PKK Provinsi Sulawesi Selatan dan Acara Gerakan Pangan Murah yang diselenggarakan oleh Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan.



Belanja Jasa Audit/Surveilance ISO 17025:2017 dimaksudkan untuk memperoleh dan mempertahankan pengakuan formal sebagai laboratorium uji berstandar oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN) sehingga meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat pengguna jasa terkait hasil uji yang dikeluarkan.





Stadi Tiru Inovasi Produk Hasil Perikanan dimaksudkan untuk dapat melihat dan mempraktekkan secara langsung proses pembuatan produk olahan serta dapat membandingkan hasil olahan di daerah lain dengan yang diproduksi sendiri sehingga produk yang diciptakan dapat bersaing dipasar.

## SASARAN II : Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Keberhasilan capaian sasaran strategis meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan diukur dengan 3 (tiga) indikator yaitu Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP), Nilai Tukar Nelayan (NTN) dan Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)

Tabel 31.

Capaian Indikator Sasaran Strategis II Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan Perikanan	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	110,84	111,20	100,06
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	110,46	111,92	101,32
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	111,07	106,84	96,19
Rata-rata capaian Sasaran Strategis				99,19

### INDIKATOR 5

### NILAI TUKAR USAHA PERIKANAN (NTUP)

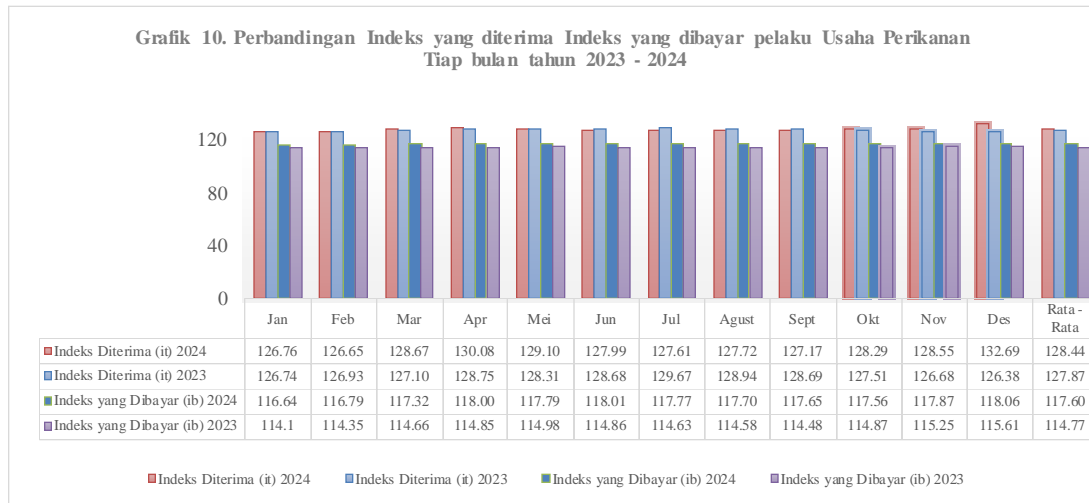
Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP) adalah perbandingan indeks harga yang diterima Usaha Perikanan (*It*) terhadap indeks harga yang dibayar Usaha Perikanan (*Ib*). Nilai Tukar Usaha Perikanan digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan pelaku usaha perikanan dengan melihat tingkat kemampuan/daya beli. Data NTUP bersumber dari Bada Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

$$NTUP = \frac{\text{Indeks yang diterima pelaku usaha perikanan (it)} \times 100\%}{\text{Indeks yang dibayar pelaku usaha perikanan (ib)}}$$

Tabel 32.  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 5 Nilai Tukar Usaha Perikanan

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Tahun 2024			akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	97.33	104.04	109.35	112.02	111.20	109.33	101.71	112.36	98.97

Nilai tukar usaha perikanan (NTUP) terealisasi 111.20 mencapai target 100.06 % , turun 0,73 % dibandingkan tahun 2023 sebesar 112,02 kurun waktu 2020-2024 NTUP terus meningkat dengan capain tertinggi NTUP di tahun 2023 dan terendah di tahun 2020 sebesar 97,33.



Penurunan NTUP terjadi karena meningkatnya rata-rata indeks yang dibayar (ib) oleh pelaku usaha perikanan yaitu sebesar 114,77 tahun 2023 menjadi 117,60 tahun 2024 sedangkan rata-rata ndeks yang diterima (it) tidak meningkat signifikan yaitu 127,87 di tahun 2023 menjadi 128,44 di tahun 2024. Pengeluaran konsumsi rumah tangga yang

tidak tetap, pendapatan usaha perikanan khususnya budidaya yang turun karena harga rumput laut yang turun. Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) merupakan salah satu penyusun indeks yang dibayarkan (ib).

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pelaku usaha perikanan nelayan adalah perbaikan teknologi sarana prasarana produksi pelaku usaha perikanan, peningkatan SDM pelaku usaha kelautan dan perikanan, penyediaan sarana prasaran menunjang produksi dan juga mengefisensikan biaya operasional.

## INDIKATOR 6

## NILAI TUKAR PEMBUDIDAYA (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah salah satu indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur daya tukar hasil usaha budidaya dengan pemenuhan kebutuhan sehari-sehari dan biaya usaha budidaya. Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi, nilai tukar sama dengan 100 berarti pembudidaya mengalami impas kenaikan harga produksi sama dengan kenaikan harga konsumsi dan nilai tukar lebih kecil dari 100 berarti pembudidaya mengalami defisit kenaikan harga produksi lebih kecil daripada kenaikan harga konsumsi. Data NTUP bersumber dari Bada Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

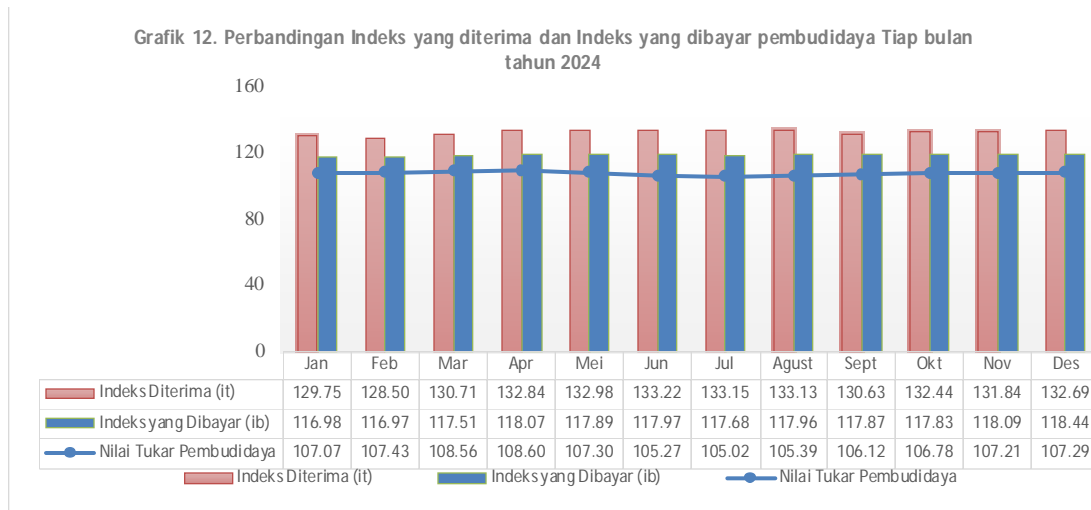
$$\text{Nilai Tukar Pembudidaya} = \frac{\text{Indeks yang diterima pembudidaya (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar pembudidaya (ib)}}$$

Tabel 33.  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 6 Nilai Tukar Pembudidaya

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Tahun 2024			Target akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	96.06	101.90	109.98	111.35	106.84	111.07	96,19	112.19	95,23

Nilai tukar pembudidaya terealisasi 106,84 mencapai target 96,19 % turun 4,05 % dibandingkan tahun 2023 sebesar 111,35. Kurun waktu tahun 2020-2024 capain tertinggi NTPi di tahun 2023 sebesar 111,35 dan terendah di tahun 2020 sebesar 96,06. Nilai tukar lebih besar dari 100 berarti pembudidaya mengalami surplus kenaikan harga produksi lebih tinggi dibanding kenaikan harga konsumsi. Namun Penurunan NTPi menunjukkan penurunan pendapatan pembudidaya dibandingkan tahun sebelumnya. kurun waktu bulan januari - Desember tahun 2024 rata-rata indeks yang diterima pembudidaya (it) sebesar 125,5 lebih rendah dibandingkan tahun 2023 sebesar 127.71 sedangkan rata-rata indeks yang dibayar nelayan (ib) sebesar 117,46 lebih tinggi dibandingkan tahun 2023 sebesar 114.68. Hal ini sejalan dengan penurunan nilai produksi perikanan budidaya khususnya rumput laut yang mengalami penurunan.





Upaya yang dapat dilakukan adalah menjaga produktivitas pembudidaya dan stabilitas harga komoditas di tingkat pembudidaya serta biaya pengeluaran yang tidak meningkat. Yang dapat diintervensi oleh Dinas kelautan dan perikanan adalah penyediaan benih ikan agar usaha pembudidaya dapat terus berlangsung.

### INDIKATOR 7

### NILAI TUKAR NELAYAN

Nilai Tukar Nelayan (NTN) adalah perbandingan indeks harga yang diterima nelayan (*It*) terhadap indeks harga yang dibayar nelayan (*Ib*). Nilai Tukar Nelayan atau NTN digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan nelayan dengan melihat tingkat kemampuan/daya beli nelayan. NTN juga menunjukkan daya tukar (terms of trade) dari produk perikanan tangkap dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Data NTN bersumber dari Bada Pusat Statistik (BPS) dengan formulasi sebagai berikut :

$$\text{Nilai Tukar Nelayan} = \frac{\text{Indeks yang diterima nelayan (it)} \times 100 \%}{\text{Indeks yang dibayar nelayan (Ib)}}$$

Tabel 34  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran II IKU 7 Nilai Tukar Nelayan

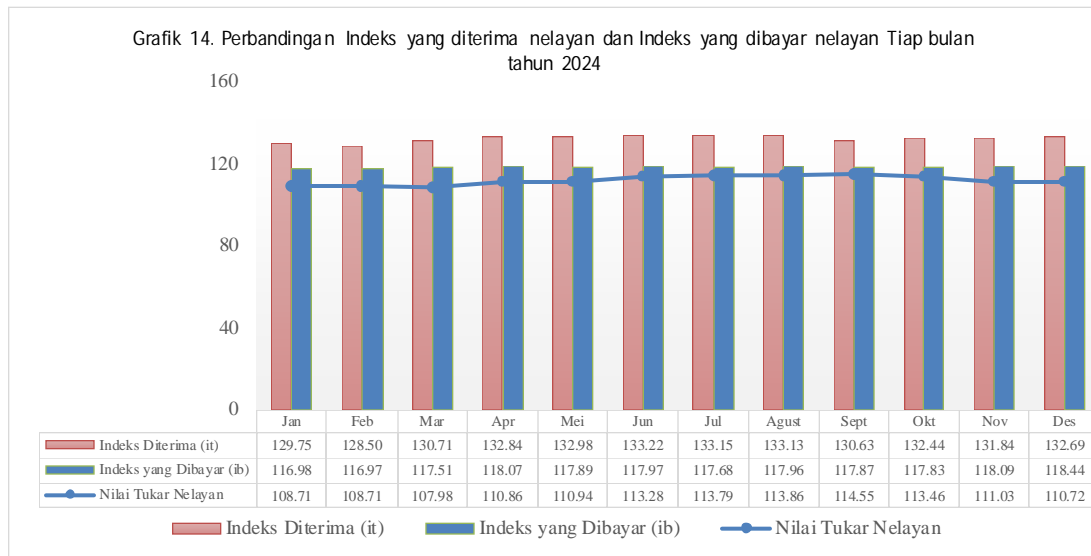
Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun				Tahun 2024			Target akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	99,64	107,43	109,29	111,49	111,92	110,46	101,32	111,56	100,32

Nilai tukar nelayan terealisasi 111,92 mencapai target 101,32 % dan naik 0,39 % dibandingkan tahun 2023 sebesar 111,49 dengan peningkatan rata-rata sebesar 1,13 % kurun waktu 2020-2024 dengan capaian tertinggi NTN di tahun 2024 111,92 dan terendah di tahun 2020 sebesar 99,64. Peningkatan NTN menunjukkan peningkatan pendapatan nelayan. Hal ini sejalan dengan peningkatan produksi dan nilai produksi perikanan tangkap.

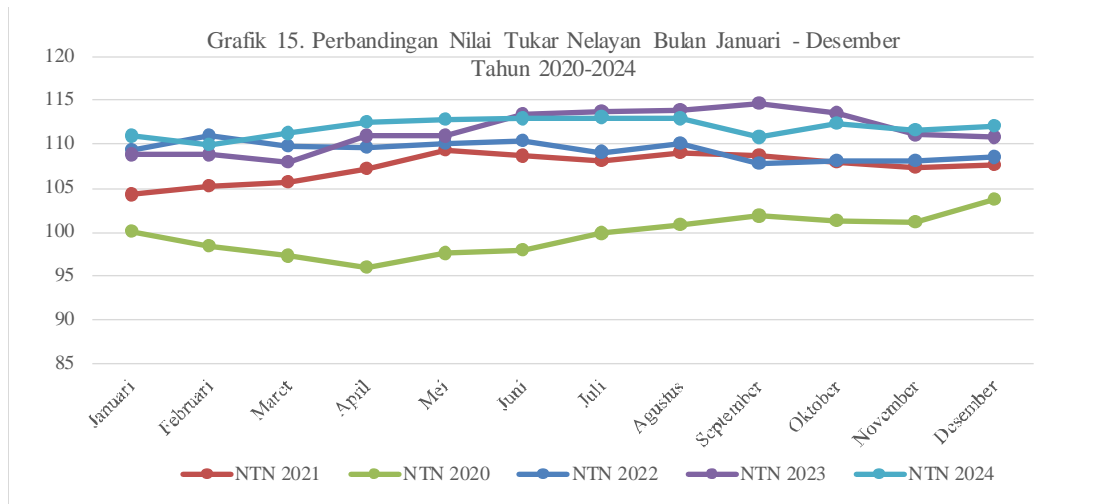
NTN menggambarkan tentang tingkat kesejahteraan nelayan dari waktu ke waktu. Kurun waktu bulan Januari - Desember tahun 2024 rata-rata indeks yang diterima nelayan (it) sebesar 131,82 sedangkan rata-rata indeks yang dibayar nelayan (ib) sebesar 117,77. NTN berada di atas 100 artinya kenaikan harga rata-rata yang diterima nelayan lebih besar dengan yang dibayarkan atau usaha perikanan tangkap memberikan keuntungan bagi nelayan dan dapat dijadikan sebagai kegiatan usaha masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerimaan nelayan adalah alat bantu tangkap seperti rumpon untuk mengoptimalkan biaya operasional, fasilitasi pembangunan SPDN di pelabuhan ke Kementerian untuk mempermudah akses nelayan terhadap kebutuhan BBM.



Kurun waktu tahun 2017-2024 realisasi NTN tahun 2024 merupakan capaian tertinggi ini menunjukkan tingkat kesejahteraan nelayan semakin membaik.







Jika dilihat trend NTN tiap bulan setiap tahun, tren peningkatan maupun penurunan tidak tetap hal ini menunjukkan bahwa banyak variabel yang mempengaruhi

Tabel 35  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis II IKU 5, IKU 6 dan IKU 7

Sasaran Strategis II	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
IKU 5 IKU 6 IKU 7	Nilai tukar nelayan Nilai tukar usaha perikanan Nilai tukar pembudidaya
Indikator Kinerja Pembentuk	Cakupan bina kelompok nelayan
	Persentase produksi kelompok nelayan
Program Pengampuh	Program pengelolaan perikanan tangkap

**a. Cakupan Bina kelompok nelayan**

Cakupan bina kelompok nelayan adalah jumlah kelompok yang mendapatkan pembinaan/bantuan pemerintah dibandingkan jumlah kelompok nelayan yang terdata  
 Formulasi Cakupan bina kelompok nelayan adalah :

$$= \frac{\text{Jumlah kelompok mendapatkan bantuan pemda tahun } n}{\text{Jumlah kelompok nelayan}} \times 100$$

Tabel 36.  
Capaian Indikator Cakupan Bina Kelompok Nelayan tahun 2017 – 2024

Indikator	Tahun							
	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapatkan Bantuan Pemda Tahun n (kelompok)	78	50	55	21	60	86	72	12
Jumlah Kelompok Nelayan (kelompok)	308	311	314	314	314	314	314	314
Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)	25,32	16,08	17,52	6,68	19,11	27,39	22,93	13,18
Target	-	-	-	-	23,89	27,07	30,25	
Capaian	-	-	-	-	79,98	101,18	75,80	

Jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan pemerintah tahun 2024 adalah 14 kelompok terdiri dari 12 kelompok nelayan laut dan 2 kelompok nelayan PUD. Tidak tercapainya target karena adanya refocusing anggaran alokasi rumpon laut dalam dan rumah ikan dasar dari target awal 122 kelompok terdiri dari 116 kelompok dan 6 kelompok nelayan PUD

#### b. Persentase produksi perikanan kelompok nelayan

Persentase produksi kelompok nelayan adalah jumlah produk kelompok nelayan yang mendapatkan pembinaan/bantuan pemerintah dibandingkan produksi perikanan tangkap daerah. Formulasi persentase produksi kelompok nelayan adalah :

$$\frac{\text{Produksi kelompok mendapatkan bantuan pemda tahun } n}{\text{Total produksi Daerah}} \times 100 \%$$

Tabel 37  
Capaian Indikator Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun					Target 2024	Capaian (%)
	2020	2021	2022	2023	2024		
Persentase Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	*	18,11	29,43	34,69	-	31,86	-

Data Realisasi persentase produksi perikanan kelompok nelayan sebesar ... % atau mencapai ... % dari target. Persentase produksi kelompok nelayan mencapai target ... % dan naik .... % dibandingkan tahun 2023. **Faktor penghambat kinerja disebabkan jumlah kelompok yang mendapatkan bantuan di tahun 2024 tidak mencapai target dan mengalami penurunan karena refocusing kegiatan.**

#### Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja

Sasaran meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan dapat dicapai melalui program pengelolaan perikanan tangkap kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil dan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat di Usahakan Lintas kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) daerah Provinsi sebagaimana telah dijelaskan pada analisis program /kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran I sebelumnya. Kegiatan tersebut juga **untuk mendukung program pusat yaitu penanganan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Selatan, dilaksanakan bantuan alat tangkap dan bantuan asuransi nelayan.** Kelompok nelayan yang mendapat bantuan yang masuk dalam **data P3KE (data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim)** untuk memastikan pemberian bantuan tersebut baik itu penerimaannya maupun pemanfaatannya oleh masyarakat nelayan khususnya yang tergolong dalam masyarakat miskin .

## SASARAN III : Meningkatnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Secara Berkelanjutan

Keberhasilan capaian sasaran strategis III diukur dengan 3 indikator yaitu : (1) Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola (2) proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman, (3) Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan

Tabel 38  
Capaian Indikator Sasaran Strategis III Meningkatnya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya kelestarian dan kualitas lingkungan sumberdaya kelautan dan perikanan	Cakupan luas kawasan konservasi yang dikelola (%)	96,08	68,05	70,84
	Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)*	59,56	62,52	104,96
	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan (%)	97,8	48,97	50,07
Rata-rata capaian Sasaran Strategis				75,29

### INDIKATOR 8

### CAKUPAN LUAS KAWASAN KONSERVASI PERAIRAN DAERAH YANG DIKELOLA

Kawasan lindung perairan atau kawasan konservasi perairan menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 14 Tahun 2016 adalah kawasan perairan yang dilindungi, dikelola dengan sistem zonasi, untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Penghitungan realisasi dilakukan dengan

menjumlahkan total luas kawasan konservasi yang telah /proses SK Menteri Kelautan dan Perikanan. Formulasi untuk mengukur adalah :

$$\text{Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola} = \frac{\text{Luas kawasan konservasi daerah yang dikelola (SK Menteri) dan daerah perlindungan laut}}{\text{Total luas kawasan konsersvasi sesuai Perda No. Tahun 2022 (849.969,66 Ha)}}$$

Tabel 39  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran III IKU 8 Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan yang dikelola

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2024			Akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Cakupan Luas Kawasan Konservasi yang Dikelola (%)	*	*	67,0	67.01	68.09	96.08	70.84	99.67	71.07

Cakupan luas kawasan konservasi yang dikelola sebesar 68.09 % mencapai target sebesar 70.84 %. Tahun 2024 ditargetkan 7 kawasan ditetapkan SK Menteri KKP dengan total luas 816.593,26 Ha , sampai dengan tahun 2024 teralisasi 5 kawasan dengan luas 578.435,53 Ha. Dua Kawasan lainnya yaitu KKPD Teluk Bone sedang proses penetapan SK dimana telah selesai Survey dan FGD sedangkan KKM Bontobahari belum dapat dialokasikan di tahun 2024. Hal disebabkan tindak lanjut arahan dari KKP dan Kemendagri di acara pertemuan Rakortekbangda agar OPD memprioritaskan penganggaran Kawasan Konservasi yang telah memiliki SK Menteri untuk disusun rencana pengelolaaannya.

Tabel 40  
Luas kawasan konservasi perairan yang dikelola Tahun 2020 - 2024

Uraian	Tahun				2024		
	2020	2021	2022	2023	Reaisasi	Target	Capaian
Luas Kawasan Konservasi yang telah SK Menteri	*	*	569.269,6	569.269,6	578.435,53	816.593.3	70.83

Uraian	Tahun				2024		
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian
Daerah Perlindungan Laut (DPL)	*	*	223.57	296.73	306.96	357.89	85,77
Total Luas Kawasan Konservasi sesuai Perda (Ha)	*	*	849.969,66	849.969,66	849.969,66	*	*
Cakupan luas kawasan konservasi perairan daerah yang dikelola (%)	*	*	67,0	67.01	68.09	96,08	70.84

Selain itu upaya yang dilakukan adalah rehabilitasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang terdegradasi dilakukan upaya rehabilitasi melalui rehabilitasi mangrove sebagai daerah perlindungan laut (DPL) dimana tahun 2024 telah dilakukan rehabilitasi mangrove sekitar 332.435 batang dengan luas 10,23 Ha. Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang eksosistemnya rusak yang Pulih kembali karena dilakukan rehabilitasi ekosistem.

Perluasan kawasan konservasi laut merupakan program utama di sektor kelautan dan perikanan yang berbasis **Ekonomi Biru**. Upaya yang dilakukan adalah akselerasi penetapan kawasan konservasi melalui SK Menteri agar kawasan konservasi dapat dikelola secara efektif. Telah dilaksanakan kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan akan dilaksanakan kolaborasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat untuk percepatan penetapan Kawasan Konservasi yaitu tahun 2025 bersama Yayasan *Blue Forest* akan dilakukan penyusunan Rencana Pengelolaan Zonasi (RPZ) Kawasan Konservasi Pulau Lanjukung Makassar dan Pulau Tanakeke Takalar.

Tantangan yang dihadapi adalah pengelolaan kawasan konservasi yang telah ditetapkan SK Menteri selanjutnya perlu menunjuk unit pengelola kawasan konservasi sesuai peraturan perundang-undangan, menyusun dan menetapkan dokumen rencana pengelolaan kawasan konservasi serta melaksanakan kegiatan pengelolaan kawasan konservasi sesuai dengan dokumen rencana pengelolaan.

**INDIKATOR 9**

**PROPORSI TANGKAPAN IKAN YANG BERADA DALAM BATASAN BIOLOGIS YANG AMAN**

Formulasi untuk mengukur proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman adalah :

$$\text{Proporsi tangkapan ikan} = \frac{\text{Jumlah tangkapan tahun } n}{80 \% \text{ dari tangkapan maksimum lestari yaitu } 743.776 \text{ ton}} \times 100 \%$$

Potensi lestari (Maximum Sustainable Yield/MSY) sumber daya perikanan tangkap tahun 2011 untuk nasional diperkirakan 6,4 juta ton per tahun dan untuk provinsi Sulawesi Selatan dengan potensi 929,7 ribu ton per tahun, sedangkan potensi yang dapat dimanfaatkan (Total Allowable Catch/jumlah tangkapan yang diperbolehkan/JTB) adalah 80 persen dari MSY atau sebesar 5,12 juta ton untuk nasional dan untuk provinsi sebesar 743.776 ton. Data MSY ini diperoleh dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan sehingga batasan biologis berada pada kategori aman dimana proporsi tangkapan ikan provinsi Sulawesi Selatan < 100%.

Tabel 41  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis III IKU 9 Proporsi Tangkapan Ikan Berada dalam Batasan Biologis yang Aman

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi tahun-				Tahun 2024			Akhri RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	47,73	50,53	52,61	61,96	62,52	59,56	104,97	61,95	100,9

Proporsi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman sebesar 62,52 % mencapai target sebesar 104,97 % dan naik 0,89 % dibandingkan tahun 2023

sebesar 61,96 %. Peningkatan tersebut disebabkan peningkatan produksi tangkap di laut naik di tahun 2024.

Indikator ini digunakan untuk memantau kelestarian sumberdaya ikan dan kelangsungan usaha penangkapan karena sebagai data kontrol produksi perikanan tangkap untuk tidak melebihi 100 persen dari jumlah tangkapan yang diperbolehkan (Total Allowable Catch/TAC) yaitu 743.776 ton (data dari Komisi Nasional Pengkajian Ikan).

Upaya yang dilakukan untuk mendukung pengelolaan penangkapan ikan yang lestari adalah pembinaan ke masyarakat berupa alat tangkap yang ramah lingkungan serta sosialisasi penerapan log book penangkapan ikan untuk memberikan gambaran tingkat pemanfaatan SDI di wilayah pengelolaan perikanan. Tingkat



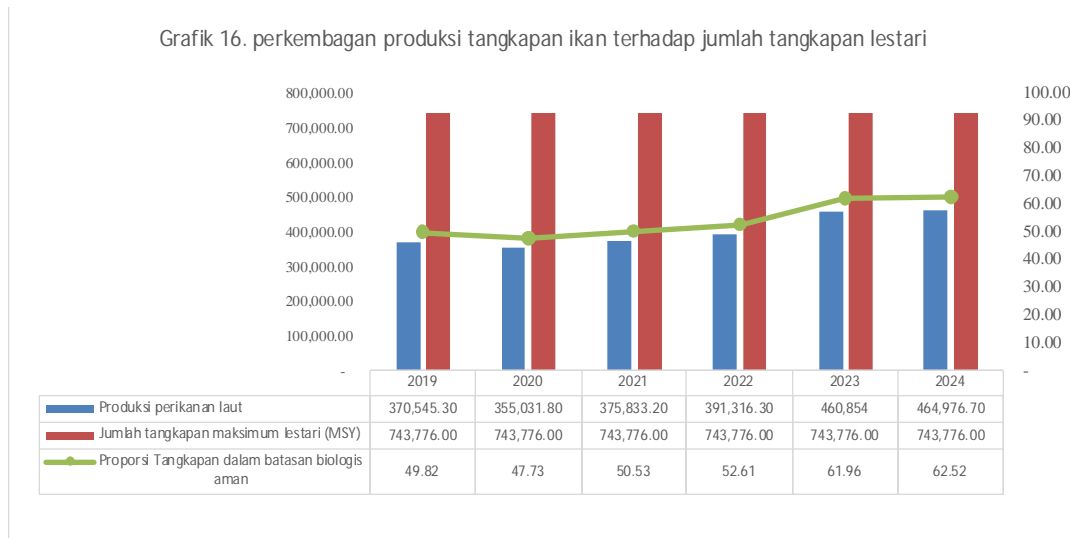
penerapan log book perikanan saat ini belum berjalan baik. Dibutuhkan peran aktif nelayan dan peran serta Pelabuhan Perikanan untuk penerapan logbook. Melalui sinergi dengan kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan pertemuan pengumpulan dan Verifikasi Data e-Log Book Penangkapan Ikan sebagai solusi aplikasi bagi nahkoda kapal perikanan untuk melaporkan catatan harian penangkapan ikannya secara akurat dan real time.

Tabel 42  
Realisasi Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman

Indikator	Realisasi Tahun -				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tangkapan Ikan (Ton)	355.031,8	375.833,2	391.316,3	460.854	464.976,7
80% dari Tangkapan Maksimum Lestari (Ton)	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0	743.776,0
Proporsi Tangkapan Ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman (%)	47,73	50,53	52,61	61,96	62,52



Grafik 16. perkembangan produksi tangkapan ikan terhadap jumlah tangkapan lestari



Proporsi tangkapan ikan di Sulawesi Selatan masih dibawah angka jumlah tangkapan yang diperbolehkan. Dalam rangka menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan pada pembangunan nasional, proporsi tangkapan ikan harus dipertahankan untuk berada dalam batasan biologis yang aman. Upaya yang dilakukan adalah bantuan sarana penangkapan ikan yang ramah lingkungan, patroli pengawasan untuk memantau penggunaan alat tangkap nelayan agar tidak menggunakan alat tangkap yang merusak (*destructive fishing*) seperti yang banyak ditemukan adalah bahan peledak, fasilitasi penerbitan perizinan perikanan tangkap yang secara tidak langsung dimaksudkan untuk mengendalikan usaha dan fungsi menjaga kelestarian fungsi sumberdaya ikan, serta penerapan log book perikanan di Pelabuhan Perikanan.

**INDIKATOR 10**

**KEPATUHAN PELAKU USAHA KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Kepatuhan (*compliance*) pelaku usaha kelautan dan perikanan adalah kesesuaian antara pelaksanaan kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan oleh para pelaku usaha kelautan dan perikanan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kelautan dan perikanan.

$$x = \sum_{i=1}^n \left( \frac{ci}{si} \right) \cdot 100\%$$

-----  
n

**Keterangan:**  
 x: Persentase kepatuhan pelaku usaha KP terhadap ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku  
 ci: jumlah pelaku usaha KP yang patuh  
 s\_i: jumlah sampel pelaku usaha KP yang diperiksa  
 i: jenis komponen pelaku usaha KP  
 n: jumlah komponen pelaku usaha KP

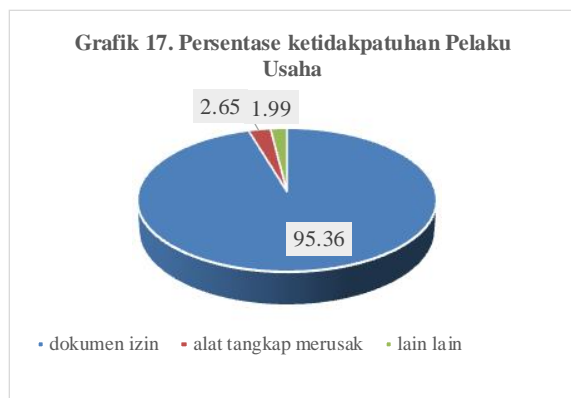
Tabel 43.  
 Capaian Indikator Sasaran Startegis III IKU 10 Kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan

Indikator Kinerja	Realisasi tahun				Tahun 2024			Akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	63,07	69,18	94,01	56,35	48,97	97,80	50,07	100	48,97

Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terealisasi 48.97 % atau mencapai 51,07 %

terhadap target yang ditetapkan. Capaian ini lebih rendah dibandingkan realisasi tahun 2023 sebesar 56,41 %.

Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha (perdirjenPSDKP nomor 21 tahun 2021). Tahun 2024 jumlah pelaku usaha yang diperiksa sebanyak 748 pelaku usaha dengan 536 diantaranya merupakan pelaku usaha yang patuh. Terdiri dari 6 komponen pelaku usaha yaitu 1) pelaku usaha pemanfaat ruang laut, 2) pelaku usaha perikanan tangkap 12 mil, 3) pelaku usaha pembudidaya laut, 4) pelaku usaha perikanan tangkap di PUD, 5) pelaku usaha pembudidaya di PUD dan 6) pelaku usaha pemasaran dan pengolahan.



NIB wajib dimiliki para pelaku usaha. Hal ini mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Cabang Dinas Kelautan hadir untuk memfasilitasi masyarakat untuk mengakses layanan perizinan tersebut. Jumlah nelayan yang telah fasilitas NIB sebanyak 331 pelaku usaha perikanan/nelayan

Ketidakpatuhan pelaku usaha didominasi pemenuhan dokumen perizinan tidak ada/tidak lengkap/masa berlaku habis pelaku usaha belum memahami pemenuhan standar/aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku, beralihnya proses perizinan yaitu melalui OSS dan tidak adanya aksesibilitas untuk mengurus perizinan. Sesuai dengan PP no 5 tahun 2021 Pasal 6 ayat 2 perizinan usaha berdasarkan risiko diberlakukan untuk 16

bidang usaha termasuk kelautan dan perikanan. Diperlukan strategi untuk untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha atas peralihan pengurusan dokumen perizinan yaitu dilaksanakan fasilitasi Nomor Induk Berusaha Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk memberikan informasi, sosialisasi pemenuhan dokumen kapal, membantu nelayan mengakses pelayanan melalui Gerai Perizinan yang ada di Pelabuhan Perikanan nelayan dan pembinaan kepada pelaku usaha yang masih baru dengan melibatkan penyuluh setenpat untuk pemenuhan standar /aturan berusaha sesuai aturan yang berlaku.

Hasil pengawasan kepatuhan pelaku usaha sebagaimana tabel berikut :

Tabel 44  
Capaian Hasil Pengawasan Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan & Perikanan  
Tahun 2020-2024

No	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang diperiksa					Persentase Kepatuhan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Usaha perikanan tangkap sampai dengan 12 mil	371	357	403	554	713	63,07	63,87	81,14	77,98	72,66
2	Pembudidayaan ikan di laut sampai dengan 12 mil	-	-	8	7	13	-	-	100	57,14	46,15
3	Perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	2	2	3	-	-	100	50,0	0
4	Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan lintas kabupaten /kota dalam 1 (satu) daerah provinsi	-	-	5	3	4	-	-	100	33,33	75,0
5	Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten /kota dalam 1	-	-	9	7	12	-	-	88,89	100	66,67

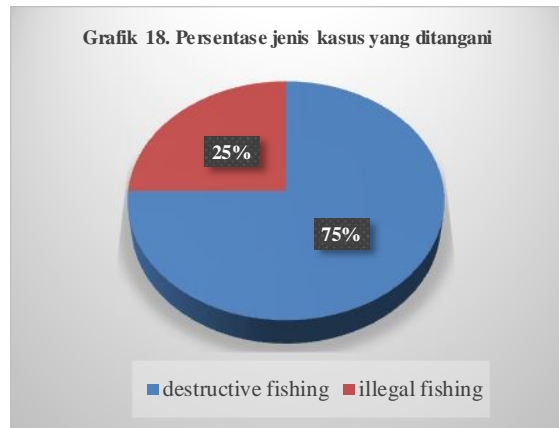
No	Pelaku Usaha	Pelaku usaha yang diperiksa					Persentase Kepatuhan (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	(satu) daerah provinsi										
6	Pemanfaat ruang laut	-	-	-	5	3	-	-	-	20	33.33
<b>Total pelaku usaha yang diperiksa ; Persentase kepatuhan</b>		<b>371</b>	<b>357</b>	<b>427</b>	<b>578</b>	<b>748</b>	<b>63.07</b>	<b>63.87</b>	<b>94,06</b>	<b>56,40</b>	<b>48,97</b>

Jika dilihat dari jumlah penanganan kasus sebagaimana tabel berikut, menunjukkan bahwa upaya-upaya pengawasan pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan harus terus dilakukan dan memerlukan dukungan berbagai pihak terkait.

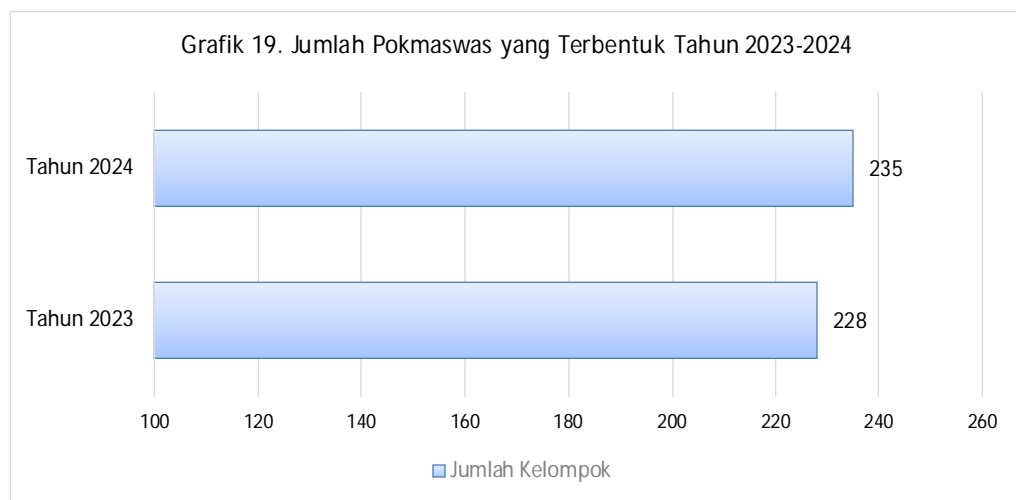
Tabel 45.  
Jumlah Penanganan kasus di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan

NO	Unit Kerja	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun	Jumlah Kasus yang ditangani tahun
		2020	2021	2022	2023	2024
1	CDK Wilayah Selatan	1	3	-	-	-
2	CDK Maminasata	2	4	2	1	3
3	CDK Bosowasi	1	8	7	5	8
4	CDK Ajatappareng	-	-	-	-	-
5	CDK Luwu Raya	-	-	-	-	-
6	CDK Selayar	-	3	1	-	-
7	CDK Pangkep	8	4	3	4	5
<b>TOTAL KASUS</b>		<b>12</b>	<b>22</b>	<b>13</b>	<b>10</b>	<b>16</b>

Dominasi penanganan kasus adalah *destructive fishing* atau penggunaan bom peledak dan *illegal fishing* atau penggunaan alat penangkap ikan yang yang dilarang/ merusak yang terjadi di daerah wilayah CDK Maminasata, CDK Pangkep dan CDK Bosowasi. Luasnya wilayah laut yang perlu diawasi menjadi kendala yang



dihadapi yaitu keterbatasan untuk mengawasi kegiatan *destructive fishing* mulai dari keterbatasan personil pengawasan dan sarana pengawasan untuk menjangkau wilayah yang sangat luas. Hal yang perlu dilakukan adalah perlunya melibatkan stakeholder terkait melalui koordinasi dan kolaborasi, peran serta masyarakat dalam pengawasan sumberdaya untuk atasi *destructive fishing* melalui sosialisasi dan rapat koordinasi pengawasan melibatkan seluruh pihak terkait, pembinaan pokmaswas, SDM pengawasan yang terdidik dan terlatih dalam keahlian pengawasan dan serta sarana prasarana pengawasan yang memadai.



Meningkatnya jumlah Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang berperan aktif dalam pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan merupakan salah satu bentuk keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan.

Capaian indikator sasaran strategis meningkatnya sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan, program dan indikator pendukungnya sebagaimana tabel berikut :

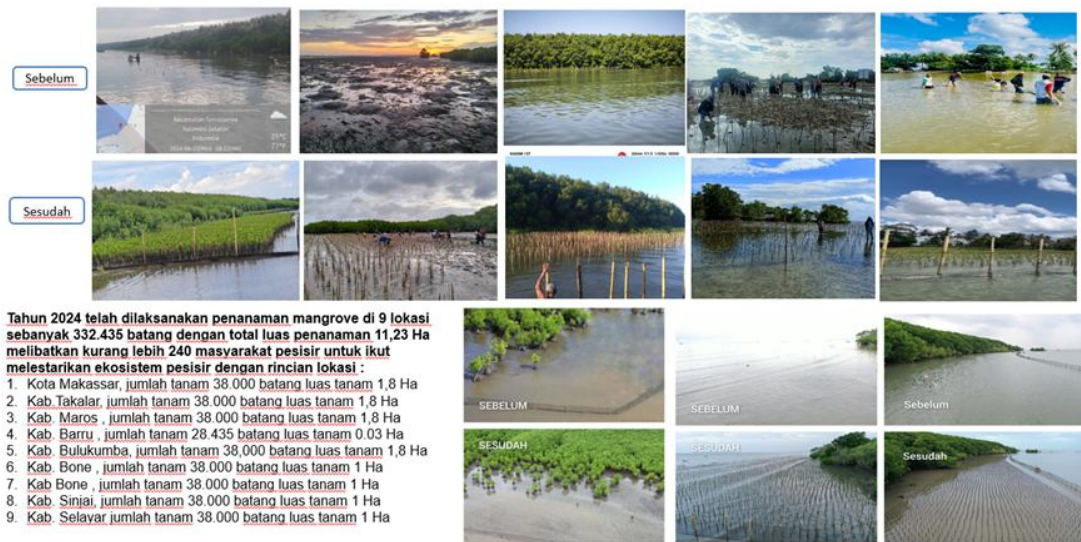
Tabel 46  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis IV IKU 8, IKU 9 dan IKU 10

Sasaran Stratis IV	Meningkatnya Kelestarian dan pengendalian pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan
IKU 8	Proporsi tangkapan ikan berada dalam batasan biologis aman
IKU 9	Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
IKU 10	Cakupan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah
Indikator Kinerja Pembentuk	Perluasan Kawasan Konservasi Perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan Cakupan Pengawasan SDKP
Program	Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

**a. Perluasan kawasan konservasi perairan yang Dikelola Secara Berkelanjutan**

Sampai dengan tahun 2024 ditargetkan 7 kawasan dengan luasan 816.593,22 yang ditetapkan SK Menteri. Terealisasi 5 kawasan yang telah ditetapkan sesuai dengan Keputusan Menteri KKP dan 2 kawasan lainnya yaitu kawasan konservasi Teluk Bone proses penetapan SK Menteri, sedangkan KKM Bontobahari belum terealisasi karena terbatasnya anggaran. Sehingga luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan sebanyak 5 kawasan seluas 578.435,53 Ha yaitu Pulau Liukang Tangaya Kab. Pangkep 505.862,34 Ha dan Liukang Tangaya Kab. Pangkep 63.407,23 Ha. Pulau Pasigusung Selayar 1.769,73 , Pulau Kayuadi selayar 6.899,43 Ha, Pulau Pannikiang Barru 46,8 Ha

Daerah Perlindungan Laut (DPL) adalah kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Rusak yang dan Pulih Kembali karena dilakukan rehabilitasi ekosistem seperti ekosistem mangrove dan terumbu karang sebagai upaya untuk melestarikan dan mengembalikan fungsi ekosistem pesisir. Aksi tersebut membutuhkan dukungan dan kepedulian masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian lingkungan perairan.



Aksi tanam mangrove sebagai upaya rehabilitasi ekosistem pesisir meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga jelesatrian sumberdaya laut

Tabel 47  
Perkembangan Luas Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang dikelola dan Daerah Perlindungan Laut (DPL)

No	Penetapan KKPd berdasarkan RZWP3K awal (Data Base Line Awal)	Luas (Ha)	Penetapan Kawasan Konservasi sesuai Perda No. 3 tahun 2022	Luas (Ha)	Luas Kawasan Konservasi berdasarkan SK Menteri KKP	Keterangan
<b>A</b>	<b>Penetapan KKPd</b>	<b>674.105,80</b>	<b>KKPD/KKP3K</b>	<b>849.969,66</b>	<b>578.435,53</b>	
1.	Kawasan Konservasi Perairan Kabupaten Luwu Utara	1.755,15	Tanalili Kab. Luwu Utara	1.510,53		
2.	Kawasan Konservasi Kabupaten Kabupaten Pangkajene/KKPD Tupabiring	66.870	Liukang Tuppabiring Kab. Pangkep	63.582,49	63.407,23	SK Menteri KKP nomor 71 tahun 2022
3.	Kawasan Konservasi Kabupaten Pangkep KKPd Liukang Tangayya	171.931,71	Pulau Liukang Tangaya Kab. Pangkep	508.534,4	505.862,3	SK Menteri KKP nomor 72 tahun 2022



No	Pentapan KKPD berdasarkan RZWP3K awal (Data Base Line Awal)	Luas (Ha)	Penetapan Kawasan Konservasi sesuai Perda No. 3 tahun 2022	Luas (Ha)	Luas Kawasan Konservasi berdasarkan SK Menteri KKP	Keterangan
4.	Kawasan Konservasi Teluk Bone (SK Pencadangan Gubernur)	423.942	Teluk Bone (Bone dan Sinjai)	238.093,55		
5.	Kawasan Konservasi Kabupaten Kep. Selayar Pulo Pasi Gusung (SK Pencadangan Gubernur)	5.018	Pasi Gusung Kep. Selayar	1.769,73	1.780,05	SK Menteri KKP nomor 36 tahun 2024
6.	Kawasan Konservasi Kabupaten Kep. Selayar Pulo Kauna Kayuadi (SK Pencadangan Gubernur)	3.983	Kayuadi Kep. Selayar	6.899,43	6.892,41	SK Menteri KKP nomor 34 tahun 2024
7.	Kawasan Konservasi Kabupaten Kabupaten Barru/KKPD Panikiang	605.94	Pulau Pannikiang Kab. Barru	496,8	496,8	SK Menteri KKP nomor 35 tahun 2024
8.			Bilongka Luwu	1.212,28		
9.			Malili Luwu timur	1.583,63		
10.			Pulau Lanyukang Makassar	1.659,99		Rencana tahun 2025
11.			Pulau Sembilan Sinjai	13.190,15		
12.			Pulau Tanakeke Takalar	11.372,6		Rencana tahun 2025
13.			KKM Bontobahari pembuatan kapal Phinisi Bulukimba	64,18		
	<b>A. Daerah Perlindungan Laut (Rehabilitasi mangrove dan terumbu karang)</b>				<b>306,96</b>	
	<b>B. Total Kawasan Lindung Perairan (A+B)</b>				<b>578.742,49</b>	

**b. Cakupan Pengawasan SDKP**

Cakupan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan adalah estimasi persentase jumlah pelaku usaha yang diperiksa dari rencana target total pelaku usaha yang akan diperiksa. Rumus menghitung cakupan pengawasan SDKP adalah :

$$\text{Cakupan Pengawasan SDKP} = \frac{\text{Jumlah pelaku usaha yang diawasi} \times 100\%}{\text{Target pelaku usaha yang diawasi}}$$

Tabel 48  
Perkembangan Cakupan Pengawasan SDKP Tahun 2020 -2024

Indikator Kinerja	Realisasi tahun				Tahun 2024			Akhir RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Pelaku Usaha yang diawasi	371	357	403	554	744	*	*	*	*
Target Pelaku usaha yang diawasi	371	357	403	554	681	*	*	*	*
Cakupan pengawasan SDKP	100	100	100	100	109.25	100	109.25	100	109.25

Tingginya capaian kinerja didukung aktivitas pengawasan yang dilaksanakan oleh CDK Bosowasi dimana pada triwulan III ada 3 bulan berturut turut (Juli, Agustus dan September ) dilaksanakan tiga kali kegiatan pemantauan secara tersendiri di dua pelabuhan besar yaitu PPI Lappa Sinjai dan PPI Lonrae Bone dimana pada bulan itu kondisi musim di teluk Bone masa peralihan (anomali cuaca) sehingga banyak kapal perikanan ditemukan di pelabuhan tangkahan, pelabuhan rakyat dan di laut sekitar teluk Bone tidak full melakukan aktifitas , mereka tidak pergi jauh karena ancaman cuaca, arus dan gelombang, lebih banyak passif di tempat karena pertimbangan safety oprational sehingga banyak ditemukan armada kapal perikanan.



Aktivitas pengawasan kepada 6 komponen pelaku usaha sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi

Tabel 49  
Jumlah Sarana Prasarana Pengawasan di 7 wilayah Cabang Dinas Kelautan

Sarana Kapal Pengawas Perikanan	
Speed Boat Pengawasan 12 Meter <b>Mangiwang 02</b>	CDK Ajatappareng
Speed Boat Pengawasan 12 Meter <b>Mangiwang 04</b>	CDK Bosowasi
Speedboat Pengawasan SDKP 8,5 Meter <b>Mangiwang 06</b>	CDK wilayah Selatan
SpeedBoat Pengawasan 12 Meter <b>Mangiwang 03</b>	CDK Maminasata
SpeedBoat Pengawasan 12 Meter <b>Mangiwang 05</b>	CDK Selayar
Speed boat pengawasan 12 meter <b>Mangiwang 01</b>	CDK Pangkep

Aksi yang dilakukan adalah melakukan pembinaan dilapangan , sosialisasi IUU fishing, gerai perizinan di Cabang Dinas dan UPT Pelabuhan untuk memudahkan nelayan unuk mengakses pengurusan dokumen kapal/perizinan kapal yang dibutuhkan, dan fasilitasi NIB bagi pelaku usaha kelautan dan perikanan.

#### **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran IV**

Sasaran meningkatnya Sumberdaya Kelautan dan Perikanan secara Berkelanjutan dilaksanakan 2 program sebagai berikut :

1. Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan kegiatan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil dengan terdiri dari kegiatan
  - a) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil Indikator Capaian Kegiatan penumbuhan Pokmaswas sebanyak 11 Pokmaswas, jumlah dokumen pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan sebanyak 713 dokumen, fasilitasi NIB sebanyak 331 pelaku usaha, penyediaan sarana pengawasan perahu pokmasawas 4 unit.

- b) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Indikator Capaian Kegiatan Jumlah unit usaha perikanan di Wilayah Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang mendapatkan pengawasan yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi pengawasan dokumen kapal, pengawasan aktivitas penangkapan ikan realisasi 19 unit.
2. Program pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil terdiri dari kegiatan :
- a) Kegiatan Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi Indikator Capaian Kegiatan rehabilitasi mangrove dengan 10.3 Ha, penyusunan rencana pegeolaan dan zonasi kawasan konservasi teluk Bone
  - b) Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi berupa Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Laut untuk mendukung pelaksanaan Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (KKPRL) sebanyak 1 rekomendasi

## SASARAN IV : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Terdapat satu indikator dalam mendukung sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah yaitu nilai SAKIP OPD.

Tabel 50  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP perangkat daerah	86 – 88 (A)	85,8	99,29
<b>Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis</b>				99,29

**INDIKATOR 11**

**NILAI SAKIP OPD**

Nilai SAKIP OPD adalah hasil penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Formulasi Data Nilai SAKIP adalah

**Nilai Sakip OPD = Lembar hasil Evaluasi Inspektorat**

Nilai SAKIP didapatkan dari Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Tim Inspektorat Daerah Provinsi yang bersifat tahunan, dengan capaian sebagai berikut :

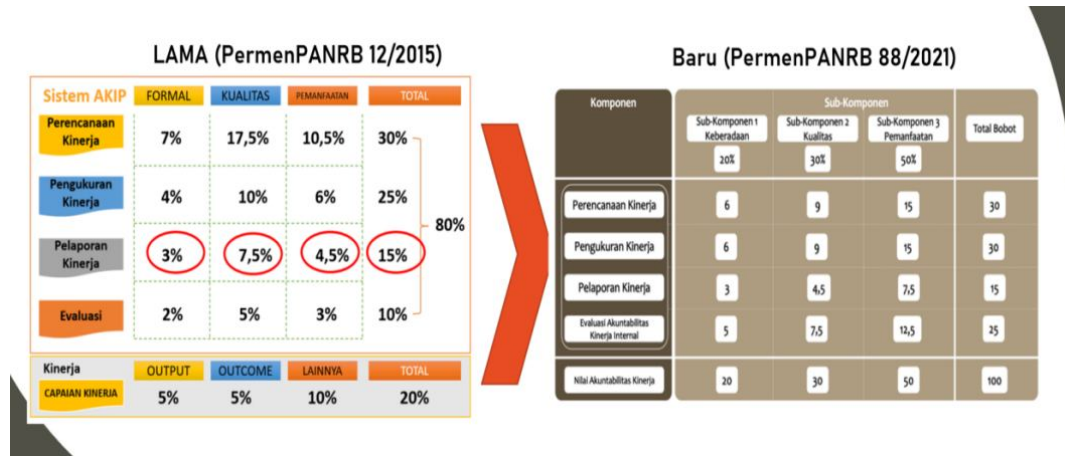
Tabel 51  
Capaian Indikator Kinerja Sasaran IV IKU 11 indikator Nilai SAKIP OPD

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun -				Tahun 2023			Target Nasional
	2020	2021	2022	2023	Realisasi*	Taregt	Capaian	
Nilai sakis OPD	85,78	83,70	85,80	86.25	86.25	86-88 A	98,01	A

Nilai SAKIP Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024 belum tersedia, oleh karenanya data proyeksi capaian 2024 menggunakan data tahun 2023 yaitu sehingga data sementara realisasi nilai SAKIP mencapai 99,29 % dari target. Selama kurun waktu tahun 2019 - 2023 nilai SAKIP DKP Sulawesi Selatan berada di peringkat "A". Pencapaian kinerja didukung oleh adanya komitmen dari pimpinan OPD dan pimpinan unit kerja dalam melaksanakan program kegiatan dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan money, untuk memastikan tercapainya target serta perbaikan berkelanjutan untuk peningkatan kinerja. Beberapa hal yang masih harus diperhatikan untuk mengoptimalkan penerapan SAKIP adalah komitmen pimpinan khususnya pimpinan masing-masing unit kerja karena dalam penyelenggaraan SAKIP tidak hanya berupa penyusunan berbagai macam dokumen melainkan dibutuhkan pula dukungan dan keterlibatan aktif dari pimpinan untuk ikut serta dalam proses perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, sampai dengan proses evaluasi. selain itu dibutuhkan penerapan sistem kerja yang kolaboratif antar unit kerja/antar OPD untuk pencapaian kinerja yang efektif dan efisien.

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Adanya perubahan penilaian di sub komponen penilaian SAKIP dimana sub komponen Pemanfaatan awalnya 24 % menjadi menjadi 50 % perlu menjadi perhatian agar Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah benar-benar bisa terimplementasikan di unit kerja.



Tabel 52  
 Hasil Evaluasi AKIP Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2024

Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2018	2019	2020	Komponen yang dinilai	Bobot (%)	2021	2022	2023	2024*
Perencanaan Kinerja	30	28,35	28,05	27,89	Perencanaan Kinerja	30	25,5	25,50	25,50	25,50
Pengukuran Kinerja	25	19,69	20,31	20,63	Pengukuran Kinerja	30	24,6	25,50	25,50	25,50
Pelaporan Kinerja	15	13,83	13,83	12,49	Pelaporan Kinerja	15	11,1	12,30	12,75	12,75
Evaluasi Internal	20	15,54	16,47	17,69	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	22,5	22,50	22,50	22,50
Pencapaian Kinerja	10	7,18	6,95	7,08						
<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>84,59</b>	<b>85,61</b>	<b>85,78</b>	<b>Jumlah</b>	<b>100</b>	<b>83,7</b>	<b>85,80</b>	<b>86,25</b>	<b>86,25</b>
<b>Kategori</b>		<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>			<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

Keterangan \*)Tahun 2024 angka proyeksi menunggu hasil evaluasi inspektorat

Hal yang perlu menjadi perhatian dari rekomendasi Tim Evaluator untuk dilakukan perbaikan adalah :

- a. Rencana aksi tahun 2023 belum dilengkapi dengan penanggung jawab /pemilik rencana aksi

- b. Target sasaran yang termuat dalam perubahan renstra 2018 – 2023 belum selaras dengan perjanjian kinerja eselon tahun 2023.
- c. Dalam Laporan kinerja terdapat beberapa indikator sasaran IKU yang belum mencapai target yang telah ditetapkan antara lain produksi perikanan, persentase penurunan tindakan IUU fishing dan nilai SAKIP perangkat daerah.

Berdasarkan rekomendasi tersebut dilakukan perbaikan yaitu :

- a. Rencana Aksi 2024 telah dilengkapi penanggung jawab /pemilik rencana aksi
- b. Telah diselaraskan target yang termuat dalam renstra 2018 – 2023 dengan target yang termuat dalam perjanjian kinerja tahun 2023 dan Telah dipastikan target renstra 2024-2026 telah selaras dengan PK tahun 2024 dan disusun berdasarkan analisis Pohon Kinerja dan cascading.
- c. Monitoring dan evaluasi secara berkala terkait dengan pencapaian target yang ditetapkan melalui evaluasi Perjanjian Kinerja per triwulan, laporan evaluasi kegiatan Optimalisasi peningkatan produksi perikanan dengan pemberian sarana prasarana peningkatan produktivitas seperti sarana perikanan tangkap (rumpon, rumah ikan dasar), sarana garam (geomembran, tunnel, gudang garam) dan sarana perikanan budidaya (rumpuk laut, penebaran benih ikan sekitar 4 Juta ekor),serta pengembangan sarana prasarana pelabuhan perikanan, Instruksi /perintah ke unit kerja untuk pencapaian kinerja yang belum tercapai, Optimalisasi pencapaian target SAKIP melalui rapat internal pembahasan tindak lanjut evaluasi SAKIP untuk pencapaian nilai SAKIP yang lebih baik, strategi penurunan tindak IUU Fishing melalui optimalisasi pengawasan kepatuhan pelaku usaha Kelautan dan Perikanan semula ditargetkan 490 dokumen pengawasan menjadi 640 dokumen pengawasan serta pelaksanaan fasilitasi Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai upaya peningkatan kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan.



Tabel 53  
Indikator kinerja pembentuk Sasaran Strategis IV IKU 11

Sasaran Srategis IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
IKU 11	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
Indikator Kinerja Pembentuk	Rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah Rata-rata nilai SKP ASN Perangkat daerah Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti
Program	Penunjang urusan pemerintah daerah

a. Rata-rata capaian indikator kinerja program perangkat daerah

Cara menghitung indikator kinerja Capaian kinerja program perangkat daerah :

$$\text{Persentase Capaian Kinerja Program} = \text{Lembar hasil Evaluasi}$$

Tabel 54  
Capaian Indikator Rata-Rata Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi Tahun				Tahun 2024			Target RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Target	Capaian	Target	Capaian
Rata –Rata capaian kinerja program perangkat daerah	82,34	109,07	97,86	136,92	133,08	82,96	160,42	91,47	144,65

Persentase capaian kinerja Program Perangkat Daerah terealisasi 133,08 % atau mencapai target 160.42 %.Capaian kinerja program melampaui target yang ditetapkan disebabkan adanya indikator program yang jauh melampai target yaitu indikator produksi garam.. Capaian program dapat dilihat pada lembar hasil evaluasi tabel 11 berikut :

Tabel 55  
 Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Program tahun 2024

Program	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi	Capaian (%)	
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1	Nilai Produksi Perikanan Tangkap (Rp M)	11,933.56	14,268.48	119.57
	2	Produksi Perikanan tangkap (ton)	442,959.60	511,455.20	115.46
	3	Persentase Pelabuhan Perikanan yang memiliki sarana prasarana yang sesuai standar operasional (%)	84.21	89.47	106.25
	4	Cakupan Bina Kelompok nelayan (%)*	29.00	3.82	13.18
	5	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan (%)	30.62	-	Tahap perhitungan
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	6	Nilai Produksi Perikanan Budidaya (Rp M)	21,850.16	16,804.69	76.91
	7	Produksi Perikanan budidaya (ton)	4,331,299.70	4,294,870.70	99.16
	8	Persentase Ketersediaan benur berkualitas (%)	100	6.78	6.78
Program Pengelolaan Kelautan Pesisir dan PPK	9	Produksi garam rakyat (ton)	5,000	48,018.64	960.37
	10	Cakupan jumlah sarana dan prasarana pendukung produksi perikanan (%)	56.89	54.21	95.28
	11	luas kawasan konservasi perairan yang dikelola secara berkelanjutan (%)	816,593.22	578,742.49	68,09
Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	12	Nilai Produksi ikan konsumsi yang dipasarkan (Rp M)	391.94	525.95	134.19
	13	Produksi olahan ikan (ton)	6,150.43	6,956.12	113.10
	14	Persentase pengujian mutu produk perikanan (%)	100	128.84	128.84
Program pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan	15	Cakupan pengawasan SDKP (%)	100.00	109.25	109.25
Program penunjang urusan pemerintah daerah	16	Rata-rata nilai SKP ASN perangkat daerah	100.42	100.42	100.00
	17	Persentase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti (%)	100	100	100.00
<b>Rata -rata Capaian indikator kinerja program</b>				<b>133.08</b>	

**b. Rata-rata nilai SKP ASN Perangkat Daerah**

Tabel 56  
Capaian Indikator Kinerja rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Realisasi				Tahun 2024 (Akhir RPJMD)			Target RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Taregt	Capaian	Target	Capaian
Rata-Rata Nilai SKP ASN Perangkat Daerah	*	*	99.47	99.44	100	100	100	100	100

Perlu konsultasi lebih lanjut terkait pengukuran indikator karena sejak tahun 2022 penilaian SKP berubah yang awalnya menggunakan angka, berdasarkan PermenpanRB nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai ASN, predikat kinerja pegawai yaitu "sangat baik", "baik", "butuh perbaikan", "kurang" dan "sangat kurang" yang dinilai berdasarkan rata-rata hasil predikat kinerja pegawai. Sesuai arahan Bappeda pada Acara Verifikasi inputan Evaluasi Renja OPD untuk mengisi realisasi sesuai dengan kondisi OPD jika memenuhi target baik maka diisi sesuai target



## c. Peresnetase temuan LHP yang selesai ditindaklanjuti

Tabel 57  
Capaian Indikator Kinerja Persentase Temuan Material LHP yang Selesai ditindaklanjuti

Indikator Kinerja Sasaran	Realisasi				Tahun 2024 (Akhir RPJMD)			Target RPJMD	
	2020	2021	2022	2023	Realisasi	Taregt	Capaian	Target	Capaian
Persentase temuan material LHP yang Selesai ditindak lanjuti	100	100	100	100	100	100	100	100	100

Selama tahun 2024 Tim Inspektorat melaksanakan Audit sebanyak 2 kali. Dari hasil audit tersebut terdapat 12 temuan. Semua telah ditindaklanjuti namun belum ada hasil kompilasi hasil tindak lanjut dari Inspektorat.

Tabel 58  
Jumlah Temuan material LHP tahun 2019 - 2024

Tahun	Jumlah Temuan	Dalam proses	Sudah selesai ditindaklanjuti	Persentase LHP yang ditindaklanjuti	Keterangan
2019	28	-	28	100 %	
2020	45	-	45	100 %	
2021	28	-	28	100%	
2022	26	2	24	92,31 %	2 LHP belum selesai ditindaklanjuti terkait asset kendaraan roda 2 dan roda 4 dibawah penguasaan pegawai pension
2023	8	8	-	-	
2024	12	12			Menunggu hasil kompilasi

**program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja sasaran IV.**

Sasaran meningkatnya meningkatnya akuntabilitas kinerja, perencanaan dan pengelolaan keuangan perangkat daerah dapat dicapai melalui **Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah** terdiri dari kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perencanaan Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah dengan jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja tepat waktu target 7 dokumen realisasi 7 dokumen.
2. Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi keuangan dinas kelautan dan perikanan target Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Tepat Waktu dengan Target 61 laporan realisasi 61 laporan.
3. Administrasi kepegawaian perangkat daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian dinas kelautan dan perikanan target persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan Target 100% realisasi 100%.
4. Administrasi umum perangkat daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum dinas kelautan dan perikanan target Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan Target 100 % realisasi 100%.
5. Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah, Sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah target Jumlah layanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan Target 12 bulan realisasi 12 bulan.
6. Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah, Sasaran kegiatan ini adalah Meningkatnya kualitas pelayanan pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Dinas Kelautan dan Perikanan target Jumlah Pemeliharaan

Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik dengan Target 42 unit realisasi 42 unit.

### 3.2. KINERJA ANGGARAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi serta kewenangan yang ada pada Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan tidak lepas dari adanya dukungan pembiayaan/penganggaran. Adapun Sumber pembiayaan pada tahun 2022 yang tertuang di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

#### a. Pendapatan

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, sebesar Rp. 2.685.630.000,- realisasi sebesar Rp. 3.013.005.180,- (112,19 %) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 59  
Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023 - 2024

URAIAN	Target (Rp)		Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
<b>RETRIBUSI DAERAH</b>	<b>2.908.411.150</b>	<b>1.904.000.000</b>	<b>2.828.654.450</b>	<b>1.928.587.966</b>	<b>112,19</b>	<b>101.29</b>
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Pergub. No. 88 Thn 2018)	1.069.597.100	990.020.000	1.042.662.000	1.291.825.000	98,96	130.48
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan (Perda No. 12 Thn 2019)	338.650.650	480.380.000	296.073.400	482.023.000	160,57	100.34
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah (Perda No. 12 Thn 2019)	500.000.000	430.000.000	400.126.000	151.035.000	100,70	35.12
Retribusi Penyelenggaraan Perizinan (Perda No.88 Thn 2018)	1.000.000.000	-	1.086.506.250	-	112,19	-

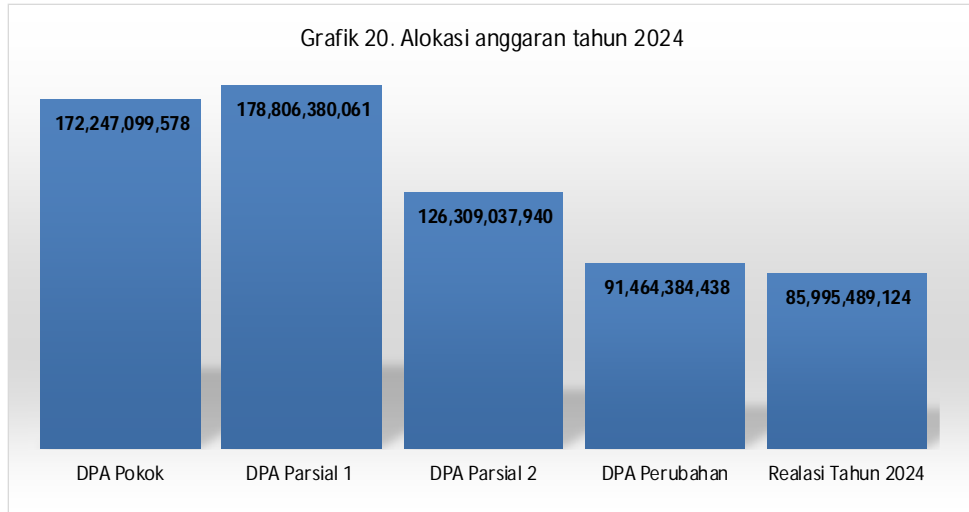
URAIAN	Target (Rp)		Realisasi (Rp)		Capaian (%)	
	2023	2024	2023	2024	2023	2024
Pendapatan lain-lainya	-	-	163.400	104.000	-	-
Hasil sewa BMD	3.286.800	3.600.000	3.286.800	3.600.0000	100	100

Secara total target PAD telah melampaui target namun masih terdapat item penerimaan PAD yang belum mencapai target dan permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Kerjasama sewa tambak Sinjai (Desa Samataring Kec. Sinjai Timur) sebesar 45 juta tidak menyelesaikan pemabayaran sesuai kontrak. Akan diberikan surat teguran kepada yang bersangkutan.
2. Kejasama sewa lahan tidak mencapai target karena pihak penyewa lahan belum menyetorkan sewa. Akan diberikan surat teguran kepada yang bersangkutan.
3. Retribusi penjualan produksi dari yaitu penjualan benih UPT PBAPL karena disebabkan keterlambatan pengadaan belanja operasional benih untuk mendukung operasional siklus ke II karena adanya kebijakan refocusing anggaran sehingga kegiatan dihentikan sementara hingga menunggu DPA perubahan terbit. Namun karena DPA perubahan terbit di pertengahan bulan November kegiatan tidak terlaksana karena proses pengadaan yang membutuhkan waktu dan Instalasi BBI Lajoa Soppeng karena fokus ke pemberian benih gratis.

## b. Belanja

Tahun 2024, total alokasi belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp. 91.464.384.438,- dan total realisasi sebesar Rp 85.995.489.124,- ( 94,02 %), dan realisasi fisik 96,25 % .



Penyebab tidak maksimalnya realisasi anggaran dan realisasi fisik adalah adanya perubahan anggaran parsial, Surat Penyediaan Dana (SPD) tidak terbit/terbit diakhir tahun sehingga waktu yang tersedia tidak mencukupi untuk pelaksanaan serta efisiensi belanja ATK, cetak dan penggandaan karena optimalisasi persuratan dan laporan secara elektronik (*e paper*) serta optimalisasi koordinasi dengan pihak kabupaten/kota sehingga efisiensi perjalanan dinas.



Tabel 60  
Realisasi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan TA. 2024

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
Dinas Kelautan dan Perikanan	91,464,384,438.0	85,995,489,124.0	94.02	96.25	5,468,895,314.0
<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>40,260,991,191.0</b>	<b>38,776,011,239.0</b>	<b>96.31</b>	<b>98.28</b>	<b>1,484,979,952.0</b>
<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>1,409,868,700.0</b>	<b>1,258,625,617.0</b>	<b>89.27</b>	<b>91.05</b>	<b>151,243,083.0</b>
X.XX.01.1.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	543,765,346.0	489,195,332.0	89.96	91.15	54,570,014.0
3.25.01.1.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	11,728,300.0	11,728,300.0	100.00	100.00	0.0
X.XX.01.1.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	17,838,600.0	12,025,600.0	67.41	79.26	5,813,000.0
3.25.01.1.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	14,604,500.0	14,603,700.0	99.99	100.00	800.0
3.25.01.1.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	13,642,900.0	12,649,100.0	92.72	100.00	993,800.0
3.25.01.1.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	447,610,654.0	403,221,264.0	90.08	91.46	44,389,390.0
3.25.01.1.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	360,678,400.0	315,202,321.0	87.39	89.97	45,476,079.0
<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>28,418,162,138.0</b>	<b>27,969,465,458.0</b>	<b>98.42</b>	<b>99.98</b>	<b>448,696,680.0</b>
X.XX.01.1.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	28,291,148,738.0	27,849,221,108.0	98.44	100.00	441,927,630.0
3.25.01.1.02.0003 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10,301,300.0	10,152,250.0	98.55	100.00	149,050.0
3.25.01.1.02.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	3,145,600.0	2,798,800.0	88.98	100.00	346,800.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
3.25.01.1.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2,876,700.0	2,033,600.0	70.69	72.17	843,100.0
3.25.01.1.02.0006 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	26,999,800.0	23,798,000.0	88.14	88.14	3,201,800.0
3.25.01.1.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	83,690,000.0	81,461,700.0	97.34	98.84	2,228,300.0
<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>31,349,100.0</b>	<b>20,953,100.0</b>	<b>66.84</b>	<b>73.36</b>	<b>10,396,000.0</b>
3.25.01.1.03.0001 Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1,825,200.0	1,613,200.0	88.38	100.00	212,000.0
3.25.01.1.03.0002 Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	21,804,000.0	11,800,000.0	54.12	61.70	10,004,000.0
3.25.01.1.03.0003 Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	6,600,000.0	6,420,000.0	97.27	100.00	180,000.0
3.25.01.1.03.0005 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1,119,900.0	1,119,900.0	100.00	100.00	0.0
<b>Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</b>	<b>29,913,800.0</b>	<b>26,996,200.0</b>	<b>90.25</b>	<b>90.25</b>	<b>2,917,600.0</b>
X.XX.01.1.04.0001 Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah	29,913,800.0	26,996,200.0	90.25	90.25	2,917,600.0
<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>305,503,200.0</b>	<b>259,273,800.0</b>	<b>84.87</b>	<b>85.93</b>	<b>46,229,400.0</b>
3.25.01.1.05.0001 Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	19,325,000.0	4,055,000.0	20.98	24.48	15,270,000.0
3.25.01.1.05.0003 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1,690,100.0	1,503,100.0	88.94	100.00	187,000.0
3.25.01.1.05.0004 Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4,692,100.0	1,889,300.0	40.27	72.89	2,802,800.0
3.25.01.1.05.0005 Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	254,669,000.0	229,361,400.0	90.06	90.06	25,307,600.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
3.25.01.1.05.0010 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	25,127,000.0	22,465,000.0	89.41	92.84	2,662,000.0
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1,377,700,600.0</b>	<b>1,196,867,050.0</b>	<b>86.87</b>	<b>97.38</b>	<b>180,833,550.0</b>
3.25.01.1.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	19,928,700.0	18,904,432.0	94.86	100.00	1,024,268.0
3.25.01.1.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	546,706,600.0	529,646,893.0	96.88	100.00	17,059,707.0
3.25.01.1.06.0003 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	52,310,400.0	50,784,105.0	97.08	100.00	1,526,295.0
3.25.01.1.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	59,092,800.0	33,384,100.0	56.49	91.66	25,708,700.0
3.25.01.1.06.0008 Fasilitasi Kunjungan Tamu	86,092,800.0	73,466,900.0	85.33	94.15	12,625,900.0
3.25.01.1.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	610,502,900.0	487,970,070.0	79.93	95.72	122,532,830.0
3.25.01.1.06.0010 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	3,066,400.0	2,710,550.0	88.40	100.00	355,850.0
<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>518,046,000.0</b>	<b>171,540,000.0</b>	<b>33.11</b>	<b>34.48</b>	<b>346,506,000.0</b>
X.XX.01.1.07.0005 Pengadaan Mebel	94,351,000.0	40,180,000.0	42.59	42.68	54,171,000.0
X.XX.01.1.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	422,945,000.0	130,610,000.0	30.88	32.54	292,335,000.0
3.25.01.1.07.0008 Pengadaan Aset Tak Berwujud	750,000.0	750,000.0	100.00	100.00	0.0
<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>5,540,554,865.0</b>	<b>5,463,720,076.0</b>	<b>98.61</b>	<b>99.37</b>	<b>76,834,789.0</b>
3.25.01.1.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	917,494,210.0	882,392,249.0	96.17	96.17	35,101,961.0
3.25.01.1.08.0003 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	40,670,000.0	12,620,000.0	31.03	100.00	28,050,000.0
3.25.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	4,582,390,655.0	4,568,707,827.0	99.70	100.00	13,682,828.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>2,629,892,788.0</b>	<b>2,408,569,938.0</b>	<b>91.58</b>	<b>96.32</b>	<b>221,322,850.0</b>
3.25.01.1.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	2,176,567,988.0	2,070,356,590.0	95.12	99.29	106,211,398.0
3.25.01.1.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	79,523,600.0	56,791,640.0	71.41	83.41	22,731,960.0
3.25.01.1.09.0008 Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	49,500,000.0	49,500,000.0	100.00	100.00	0.0
X.XX.01.1.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	226,303,700.0	202,371,708.0	89.42	100.00	23,931,992.0
3.25.01.1.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	97,997,500.0	29,550,000.0	30.15	30.43	68,447,500.0
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL</b>	<b>7,495,819,323.0</b>	<b>6,483,983,488.0</b>	<b>86.50</b>	<b>89.94</b>	<b>1,011,835,835.0</b>
<b>Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>4,918,648,523.0</b>	<b>4,486,648,338.0</b>	<b>91.22</b>	<b>94.25</b>	<b>432,000,185.0</b>
3.25.02.1.01.0001 Penyusunan dan Penetapan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	114,977,760.0	114,300,000.0	99.41	99.91	677,760.0
3.25.02.1.01.0002 Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	538,949,800.0	494,098,780.0	91.68	95.12	44,851,020.0
3.25.02.1.01.0003 Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	4,263,910,963.0	3,878,249,558.0	90.96	94.01	385,661,405.0
3.25.02.1.01.0004 Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	810,000.0	0.0	0	0	810,000.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
<b>Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi</b>	<b>106,000.0</b>	0.0	0	0	<b>106,000.0</b>
3.25.02.1.02.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi	106,000.0	0.0	0	0	106,000.0
<b>Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil</b>	<b>2,577,064,800.0</b>	<b>1,997,335,150.0</b>	<b>77.50</b>	<b>81.72</b>	<b>579,729,650.0</b>
3.25.02.1.03.0001 Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	2,552,965,600.0	1,987,848,950.0	77.86	82.12	565,116,650.0
3.25.02.1.03.0002 Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	23,799,200.0	9,486,200.0	39.86	39.86	14,313,000.0
3.25.02.1.03.0004 Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	300,000.0	0.0	0	0	300,000.0
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>	<b>29,837,392,450.0</b>	<b>29,113,970,688.0</b>	<b>97.58</b>	<b>98.61</b>	<b>723,421,762.0</b>
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil</b>	<b>10,581,159,800.0</b>	<b>10,139,483,100.0</b>	<b>95.83</b>	<b>96.75</b>	<b>441,676,700.0</b>
3.25.03.1.01.0001 Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	247,400,000.0	243,800,000.0	98.54	98.71	3,600,000.0
3.25.03.1.01.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	4,543,751,900.0	4,260,469,500.0	93.77	94.02	283,282,400.0
3.25.03.1.01.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	5,790,007,900.0	5,635,213,600.0	97.33	98.80	154,794,300.0
<b>Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>306,340,000.0</b>	<b>282,495,000.0</b>	<b>92.22</b>	<b>92.78</b>	<b>23,845,000.0</b>

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
3.25.03.1.02.0002 Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	38,470,000.0	31,000,000.0	80.58	82.14	7,470,000.0
3.25.03.1.02.0003 Penjaminan Ketersediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	267,870,000.0	251,495,000.0	93.89	94.31	16,375,000.0
<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>318,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>318,000.0</b>
3.25.03.1.03.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di Atas 10 GT sampai dengan 30 GT	318,000.0	0.0	0	0	318,000.0
<b>Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>8,374,000.0</b>	<b>7,620,000.0</b>	<b>91.00</b>	<b>94.94</b>	<b>754,000.0</b>
3.25.03.1.05.0002 Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	8,374,000.0	7,620,000.0	91.00	94.94	754,000.0
<b>Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi</b>	<b>18,934,840,650.0</b>	<b>18,684,372,588.0</b>	<b>98.68</b>	<b>99.79</b>	<b>250,468,062.0</b>
3.25.03.1.06.0001 Penentuan Lokasi Pembangunan Pelabuhan Perikanan	34,878,000.0	18,190,000.0	52.15	65.83	16,688,000.0
3.25.03.1.06.0002 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	18,792,589,650.0	18,597,204,883.0	98.96	99.85	195,384,767.0
3.25.03.1.06.0003 Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	107,373,000.0	68,977,705.0	64.24	100.00	38,395,295.0
<b>Penerbitan Izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT di Laut, Sungai, danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat</b>	<b>1,060,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,060,000.0</b>

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
<b>Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>					
3.25.03.1.08.0002 Penerbitan Persetujuan Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT	1,060,000.0	0.0	0	0	1,060,000.0
<b>Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT</b>	<b>5,300,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,300,000.0</b>
3.25.03.1.09.0002 Penerbitan Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT	5,300,000.0	0.0	0	0	5,300,000.0
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>	<b>9,510,481,140.0</b>	<b>8,030,917,382.0</b>	<b>84.44</b>	<b>88.24</b>	<b>1,479,563,758.0</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>424,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>424,000.0</b>
3.25.04.1.01.0001 Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	318,000.0	0.0	0	0	318,000.0
3.25.04.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	106,000.0	0.0	0	0	106,000.0
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut</b>	<b>3,794,152,480.0</b>	<b>3,249,156,950.0</b>	<b>85.64</b>	<b>87.68</b>	<b>544,995,530.0</b>
3.25.04.1.05.0002 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	3,702,032,780.0	3,184,371,450.0	86.02	87.51	517,661,330.0
3.25.04.1.05.0004 Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	50,059,200.0	49,000,000.0	97.88	99.99	1,059,200.0
3.25.04.1.05.0006 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	28,260,500.0	5,550,500.0	19.64	93.98	22,710,000.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
3.25.04.1.05.0007 Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	13,800,000.0	10,235,000.0	74.17	76.38	3,565,000.0
<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat</b>	<b>5,715,904,660.0</b>	<b>4,781,760,432.0</b>	<b>83.66</b>	<b>88.62</b>	<b>934,144,228.0</b>
3.25.04.1.06.0001 Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	4,022,790,300.0	3,786,097,912.0	94.12	99.94	236,692,388.0
3.25.04.1.06.0002 Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar yang Penggunaan Sumber Dayanya Lebih Efisien apabila Dilakukan oleh Daerah Provinsi dan/atau Manfaat atau Dampak Negatifnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1,693,114,360.0	995,662,520.0	58.81	61.73	697,451,840.0
<b>PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>	<b>2,454,035,990.0</b>	<b>2,088,758,518.0</b>	<b>85.12</b>	<b>95.46</b>	<b>365,277,472.0</b>
<b>Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil</b>	<b>2,375,614,390.0</b>	<b>2,054,426,518.0</b>	<b>86.48</b>	<b>95.82</b>	<b>321,187,872.0</b>
3.25.05.1.01.0001 Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut sampai dengan 12 Mil	64,202,000.0	38,616,458.0	60.15	97.89	25,585,542.0
3.25.05.1.01.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap sampai dengan 12 Mil	2,240,943,290.0	1,988,324,160.0	88.73	95.91	252,619,130.0
3.25.05.1.01.0003 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil	42,500,200.0	13,045,200.0	30.69	98.33	29,455,000.0
3.25.05.1.01.0004 Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)	27,968,900.0	14,440,700.0	51.63	80.46	13,528,200.0



PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>78,421,600.0</b>	<b>34,332,000.0</b>	<b>43.78</b>	<b>84.56</b>	<b>44,089,600.0</b>
3.25.05.1.02.0001 Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	22,074,900.0	6,274,900.0	28.43	64.10	15,800,000.0
3.25.05.1.02.0002 Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Sesuai dengan Kewenangannya	20,879,100.0	10,399,100.0	49.81	83.43	10,480,000.0
3.25.05.1.02.0003 Pengawasan Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	35,467,600.0	17,658,000.0	49.79	97.96	17,809,600.0
<b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>	<b>1,905,664,344.0</b>	<b>1,501,847,809.0</b>	<b>78.81</b>	<b>82.07</b>	<b>403,816,535.0</b>
<b>Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>5,330,000.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	<b>5,330,000.0</b>
3.25.06.1.01.0002 Penerbitan Rekomendasi Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	30,000.0	0.0	0	100.00	30,000.0
3.25.06.1.01.0003 Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5,300,000.0	0.0	0	100.00	5,300,000.0

PROGRAM/ KEGIATAN/SUBKEGIATAN	JUMLAH DANA (Rp)	REALISASI BULAN S/D BULAN DESEMBER			SISA DANA
		KEUANGAN		% FISIK	
		(Rp)	(%)		
<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar</b>	<b>1,899,992,544.0</b>	<b>1,501,847,809.0</b>	<b>79.04</b>	<b>82.02</b>	<b>398,144,735.0</b>
3.25.06.1.02.0001 Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	444,082,400.0	136,020,000.0	30.63	36.29	308,062,400.0
3.25.06.1.02.0002 Pelaksanaan Bimbingan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi Terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman untuk Dikonsumsi atau Digunakan, dan Berdaya Saing	1,455,910,144.0	1,365,827,809.0	93.81	95.97	90,082,335.0
<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi</b>	<b>341,800.0</b>	<b>0.0</b>	<b>0</b>	<b>100.00</b>	<b>341,800.0</b>
3.25.06.1.03.0001 Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	241,800.0	0.0	0	100.00	241,800.0
3.25.06.1.03.0003 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	100,000.0	0.0	0	100.00	100,000.0

### 3.3. Efisiensi penggunaan sumber daya sasaran

Setiap organisasi perlu menerapkan manajemen yaitu sebagai bentuk usaha perencanaan, koordinasi dan juga pengaturan **sumber daya yang ada** agar bisa mencapai tujuan yang **lebih efektif dan efisien**. Penerapan unsur manajemen yaitu **5M** adalah istilah yang merujuk pada faktor produksi utama yang dibutuhkan oleh suatu organisasi agar dapat beroperasi secara maksimal yaitu **Man (manusia)** merujuk pada manusia sebagai tenaga

kerja, **Machines (mesin)** merujuk fasilitas/alat penunjang kegiatan operasional maupun nonoperasional. **Money** (Uang/Modal), merujuk pada uang sebagai modal/anggaran untuk pembiayaan seluruh kegiatan, **Method** (Metode/Prosedur) merujuk pada metode/prosedur sebagai panduan cara pelaksanaan kegiatan dan **Materials (Bahan baku)**, merujuk pada bahan baku sebagai unsur utama untuk diolah sampai menjadi produk akhir untuk diserahkan ke pemanfaat layanan.

Penerapan efisiensi sumberdaya pada Dinas Kelautan dan Perikanan diantaranya sebagai berikut :

#### **Efisiensi Anggaran (Money)**

**Efisiensi penggunaan sumber daya Anggaran** dilakukan untuk mengetahui seberapa besar tingkat efisiensi unit kerja dalam mencapai target yang telah ditetapkan dengan **memanfaatkan alokasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target**. Data yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan sumber daya meliputi :

- a. data capaian Sasaran Strategis;
- b. data pagu anggaran dan data realisasi anggaran.

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan pengeluaran sebenarnya. Pengeluaran seharusnya merupakan jumlah anggaran yang direncanakan untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Pengeluaran sebenarnya merupakan jumlah anggaran yang terealisasi untuk menghasilkan capaian target yang telah ditetapkan. Perhitungan menggunakan rumus Permenkeu nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dengan hasil sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Capaian Rincian Outcome (CRO)	Alaokasi Anggaran (Rp) (AARO)	Realisasi Anggaran (Rp) (RARO)	AARO X CRO	(AARO X CRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (4 X 3)	(7) = (6 - 5)
I	Sasaran Strategis I : Meningkatnya Produktivitas sektor kelautan dan perikanan yang berkelanjutan	89,11%	34.018.422.054	31.531.755.979	30.314.566.944	-1.217.189.035 (Inefisien)
II	Sasaran Strategis II : Meningkatnya Kesejahteraan masyarakat pelaku usaha kelautan dan perikanan	100,15%	9.812.180.680	9.112,315,050	9.826.620.128	714.305.078 (Efisien)
III	Sasaran Strategis III : Meningkatnya Kelestarian dan Kualitas Lingkungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	84,45%	7.372.790.513	6.575.406.856	6.226.441.410	-348.965.446 (Inefisien)
IV	Sasaran Strategis : Terlaksaksananya Penyelenggaraan Pemerintah yang Akuntabel	98,01%	40.260.991.191	38.776.011.239	39.457.797.466	683.786.227 (Efisien)
<b>Total</b>			<b>91.464.384.438</b>	<b>85.995.489.124</b>	<b>85.827.425.948</b>	<b>-168.063.176</b>
$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$						<b>= - 0,2</b>

Berdasarkan perhitungan, nilai Efisiensi Anggaran Dinas kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar - 0,2 % atau tidak efisien (*inefisien*). Hal ini menunjukkan bahwa adanya *inefisiensi* dalam pencapaian kinerja disebabkan adanya capaian indikator sasaran yang **belum optimal**.

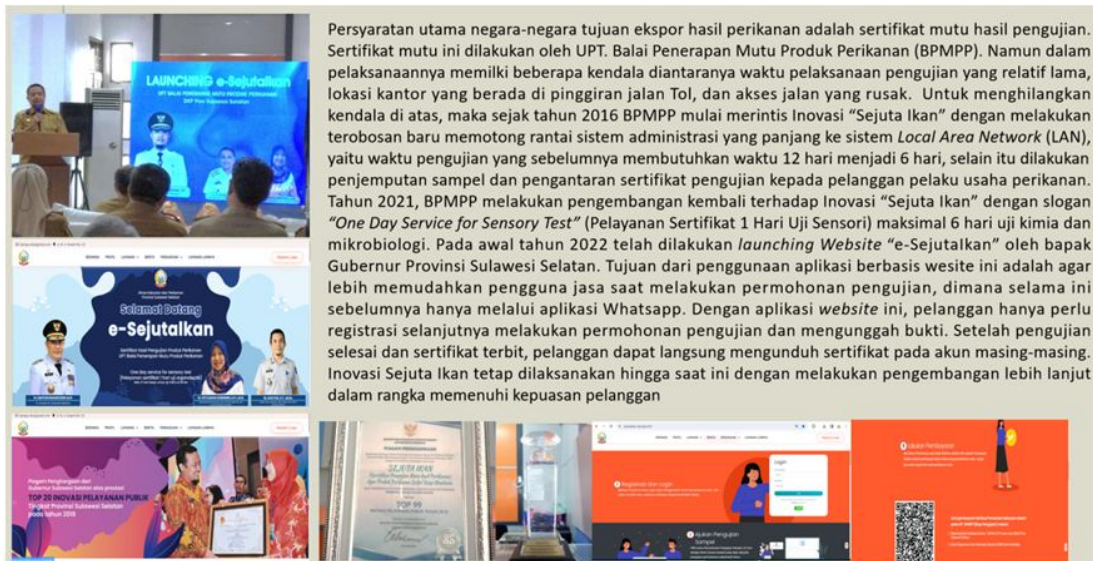
## Efisiensi penggunaan sumber daya Machine (Mesin) /penggunaan Teknologi Informasi

Meliputi peralatan, teknologi, dan sarana fisik lainnya yang digunakan dalam proses produksi atau operasional. Penggunaan teknologi untuk mendukung proses operasional yang lancar dilaksanakan pada kegiatan perencanaan dan evaluasi melalui **Aplikasi Sistem Perencanaan, Evaluasi dan Monitoing (SIMPELMO)**. Penggunaan aplikasi ini dilakukan untuk melaksanakan pengukuran Kinerja mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien **membantu produktivitas kerja** yaitu pelaporan monev dilakukan manual menjadi elektronik, menghemat waktu kerja, mengurangi beban kerja karena pekerjaan berulang, serta mudah dalam penyimpanan.



Aplikasi SIMPELMO (<https://simpelmo.e-planning>) mengintegrasikan perencanaan, penganggaran (SSH), evaluasi kinerja dalam satu sistem. Pimpinan secara real time dapat memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan pada unit kerja serta sebagai media dalam

Pelayanan *E Sejuta Ikan* melalui website mempermudah dalam permohonan pengujian yang diterapkan oleh UPT BPMPP.



Persyaratan utama negara-negara tujuan ekspor hasil perikanan adalah sertifikat mutu hasil pengujian. Sertifikat mutu ini dilakukan oleh UPT. Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan (BPMPP). Namun dalam pelaksanaannya memiliki beberapa kendala diantaranya waktu pelaksanaan pengujian yang relatif lama, lokasi kantor yang berada di pinggiran jalan Tol, dan akses jalan yang rusak. Untuk menghilangkan kendala di atas, maka sejak tahun 2016 BPMPP mulai merintis Inovasi “Sejuta Ikan” dengan melakukan terobosan baru memotong rantai sistem administrasi yang panjang ke sistem *Local Area Network* (LAN), yaitu waktu pengujian yang sebelumnya membutuhkan waktu 12 hari menjadi 6 hari, selain itu dilakukan penjemputan sampel dan pengantaran sertifikat pengujian kepada pelanggan pelaku usaha perikanan. Tahun 2021, BPMPP melakukan pengembangan kembali terhadap Inovasi “Sejuta Ikan” dengan slogan “*One Day Service for Sensory Test*” (Pelayanan Sertifikat 1 Hari Uji Sensori) maksimal 6 hari uji kimia dan mikrobiologi. Pada awal tahun 2022 telah dilakukan *launching Website* “e-Sejutalkan” oleh bapak Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Tujuan dari penggunaan aplikasi berbasis website ini adalah agar lebih memudahkan pengguna jasa saat melakukan permohonan pengujian, dimana selama ini sebelumnya hanya melalui aplikasi Whatsapp. Dengan aplikasi *website* ini, pelanggan hanya perlu registrasi selanjutnya melakukan permohonan pengujian dan mengunggah bukti. Setelah pengujian selesai dan sertifikat terbit, pelanggan dapat langsung mengunduh sertifikat pada akun masing-masing. Inovasi Sejuta Ikan tetap dilaksanakan hingga saat ini dengan melakukan pengembangan lebih lanjut dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan

### 3.4. Penghargaan yang Diterima

- ❖ Piagam Apresiasi Dinas Kelautan Dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan Dalam Mendukung Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) Tahun 2024 Oleh Badan Pusat Statistik Prov Sulawesi Selatan Tahun 2024



- ❖ UPT. BPMPP-DKP Sulawesi Selatan Meraih Peringkat Pertama Championshi TP2DD yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Jakarta tanggal 26-29 februari 2024. UPT BPMPP mendukung program Digitalisasi Sesuai Amanat Permendagri Nomor 56 tahun 2021



- ❖ Piagam Penghargaan Tatakelola Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian Tahun 2024 Atas Pencapaian Indeks Maturitas Tata Kelola SPK Oleh Badan Standarisasi Nasional Tahun 2024



- ❖ Piagam Penghargaan Gender Champion Atas Dedikasi Dalam Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender Di Pemerintahan Provinsi Sulawesi Selatan Oleh Gubernur Sulawesi Selatan.

## BAB IV P E N U T U P

### 4.1. KESIMPULAN CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil analisis terhadap capaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024 beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain :

Secara umum rata-rata nilai capaian sasaran strategis (kinerja organisasi) tahun 2024 adalah kategori “Sangat Tinggi” sebagaimana tabel berikut :

SASARAN STRATEGIS	SASARAN STRATEGIS	RATA-RATA CAPAIAN SASARAN	KRITERIA
SS1	Meningkatnya produktivitas dan Industrialisasi Sektor Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan	89,30	Tinggi
SS II	Meningkatnya kesejahteraan masyarakat pelaku usahakelautan dan perikanan	100,15	Sangat Tinggi
SS III	Meningkatnya kelestarian kualitas sumberdaya kelautan dan perikanan	84,45	Tinggi
SS IV	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	98,01	Sangat Tinggi
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran Startegis</b>		<b>92.93</b>	<b>Sangat Tinggi</b>

- a. Sebelas Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan tahun 2024, terdapat 7(tujuh) indikator yang belum mencapai target sebagaimana tabel berikut:

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KRITERIA
SS1	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Sulsel	74,29 %	Sedang
	Kontribusi nilai ekspor perikanan terhadap ekspor Sulawesi Selatan	80,84	Tinggi
	Produksi Perikanan	101.57	Sangat Tinggi
	Konsumsi Ikan	101.17	Sangat Tinggi
SS II	Nilai Tukar Usaha Perikanan (NTUP)	100,06	Sangat Tinggi
	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	101,17	Sangat Tinggi
	Nilai Tukar Pembudidaya (NTPi)	99,21	Sangat Tinggi



SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN	KRITERIA
SS III	Kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	51,07	Rendah
	Proporssi tangkapan ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman	131,45	Sangat Tinggi
	Cakupan luas kawasan konservasi perairan yang dikelola	70,84	Sedang
SS V	Nilai SAKIP perangkat Daerah	98,01	Sangat Tinggi

- b. Tahun 2024, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Selatan mengelola anggaran sebesar Rp 91.464.384.438 terealisasi Rp 85.995.489,124,- atau 94,02 % dan realisasi fisik 96,25 %.

#### 4.2. REKOMENDASI

Memperhatikan analisis capaian kinerja sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya dan dalam rangka upaya untuk meningkatkan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan, maka rekomendasi perbaikan ke depan :

- Perlunya upaya untuk peningkatan nilai produksi perikanan (*value added*) melalui peningkatan daya saing, standarisasi mutu dan harga untuk meningkatkan nilai jual/nilai produk perikanan.
- Mengoptimalkan produktivitas melalui penerapan teknologi yang aplikatif, efektif, efisien dan ramah lingkungan serta pengembangan percontohan usaha perikanan sebagai upaya mensosialisasikan model pengelolaan berkelanjutan.
- Perlunya manajemen tata kelola perbenihan yang didukung peningkatan kapasitas SDM , peningkatan kualitas induk udang (broodstock), perbaikan kualitas air, penyediaan pakan berkualitas, pengendalian penyakit sebagai upaya optimalisasi produksi benih berkualitas.

- d. Tantangan pengawasan sumberdaya kelautan dan perikanan memerlukan strategi dan inovasi pengawasan, peningkatan kapasitas pengawas, pokmaswas dan penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah.
- e. Perlunya dukungan, komitmen dan kolaborasi bersama Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Lembaga Masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perluasan dan pengelolaan kawasan konservasi agar dapat dikelola secara efektif.
- f. Optimalisasi pelaksanaan kegiatan (realisasi keuangan dan realisasi fisik) perlu penyelerasan perencanaan anggaran kas dan penyusunan SPD agar kegiatan bisa dilaksanakan secara teratur serta perlunya komitmen pelaksana kegiatan sesuai jadwal agenda yang telah disusun.